IJTIMA ULAMA SIMBOLIS GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA ULAMA (GNPF-U) PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

(Analisis Kuasa Simbolik Pierre Bourdieu)

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

OLEH:

MOH. PURNOMO

E01215014

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UINVERSITAS NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Moh. Purnomo

NIM : E1215014

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Ijtima Ulama Simbolis dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Analisis Kuasa Simbolik Pierre Bourdieu)**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan hasil plagiat kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 24 Desember 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL 20

E14C4ADF235860343

6000

ENAM RIBU RUPIAH

MOH. PURNOMO

E01215014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Ijtima Ulama Simbolis dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) pada Pemilihan Presiden Tahun 2019: Analisis Kuasa Simbolik Pierre Bourdieu"

Oleh : Moh. Purnomo

NIM: E01215014

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang skripsi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 16 Desember 2019

Pembimbing I

Drs. Loekisno Choiril Warsito, M. Ag

NIP 196303271993031004

Pembimbing II

Dr. Suhermanto, M. Hum

NIP 196708201995031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"Ijtima Ulama Simbolis Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Analisis Kuasa Simbolik Pierre Bourdieu)"** yang ditulis oleh Moh. Purnomo telah diuji

Di depan tim penguji pada tanggal 23 Desember 2019

Tim Penguji,

1. Drs. Loekisno Choiril Warsito, M. Ag (Ketua) .....
2. Dr. Suhermanto, M. Hum (Sekretaris) .....
3. Drs . Muktafi, M. Ag (Penguji I) .....
4. Fikri Mahzumi, M. Fil. I (Penguji II) .....

Surabaya, 30 Desember 2019

Dr. Kunawi Basyir, M. Ag
NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Purnomo
NIM : E01215014
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : mohpurnomo333@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : Ijtima Ulama Simbolis Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Pada Pemilihan Presiden 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Moh. Purnomo)

ABSTRAK

Judul: Ijtima Ulama Simbolis Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (Gnpf-U) Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Analisis Kuasa Simbolik Pierre Bourdieu)"

Penulis Moh. Purnomo

Keywords Kuasa Simbolik, Ijtima Ulama, GNPF-U

Skripsi ini meneliti Kuasa Simbolik dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dalam fenomena Ijtima Ulama menggunakan perspektif Pierre Bourdieu. Fenomena ini berlangsung empat kali dengan semangat yang sama. Pertama, pada 27-29 Juli 2018. Kedua, 16 September 2018. Ketiga, 1 Mei 2019. Keempat, 5 Agustus 2019. Latar belakang rentetan Ijtima Ulama tersebut adalah untuk menanggapi perpolitikan level nasional di Indonesia, yaitu pemilihan Presiden. Tujuan skripsi ini ingin menjawab sebuah pertanyaan bagaimana kuasa simbolik bisa terjadi dalam Ijtima Ulama yang dilakukan oleh GNPF-U dengan analisis menggunakan teori kuasa simbolik Pierre Bourdieu. Skripsi ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan logika berfikir deduktif. Dalam perspektif ini, penulis memeriksa proses terjadinya praktik kuasa simbolik dalam Ijtima Ulama. Fenomena tersebut memuat elemen kunci yang ditawarkan oleh Bourdieu untuk mengkaji suatu praksis sosial, yaitu *habitus, arena dan modal*. Ketiga konsep inilah yang mendukung terjadinya praktik kuasa simbolik. Hasil analisis riset penelitian ini menegaskan bahwa terjadi praktik kuasa simbolik dalam Ijtima Ulama yang dilakukan oleh GNPF-U yang mengandung nilai politis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENGESAHAN SKRIPSI.....iii

PERNYATAAN KEASLIAN.....iv

MOTTO.....v

ABSTRAK.....vi

KATA PENGANTAR.....vii

PEDOMAN TRANSLITERASI.....ix

DAFTAR ISI.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Manfaat Penelitian.....7

E. Tinjauan Pustaka.....7

F. Metode Penelitian.....12

G. Sistematika Pembahasan.....18

BAB II : SIMBOLISASI FATWA DAN KUASA SIMBOLIK

A. Konstruksi Fatwa.....19

B. Simbol dan Tanda.....22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kuasa Simbolik Pierre Bourdieu.....30

D. Sketsa Intelektual Pierre Bourdieu.....36

E. Habitus 37

F. Arena 45

G. Modal 49

H. Doksa 51

BAB III : PROFIL. SEJARAH DAN GERAKAN GNPF-U

A. Profil GNPF-U.....54

B. Sejarah GNPF-U.....54

C. Struktur GNPF-U.....57

D. Gerakan GNPF-U.....57

E. Ijtima Ulama 59

1. Ijtima Ulama I.....59
2. Ijtima Ulama II.....60
3. Ijtima Ulama III.....63
4. Ijtima Ulama IV.....65

BAB IV: KUASA SIMBOLIK IJTIMA ULAMA GNPF-U DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019

A. GNPF-U: Ijtima Ulama sebagai Simbol Projek Hegemonik.....70

B. Kuasa Simbolik Ijtima Ulama GNPF-U dalam Pemilihan Presiden.....74

C. Habitus GNPF-U dalam Ijtima Ulama 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Arena GNPF-U dalam Ijtima Ulama 80

E. Modal GNPF-U dalam Ijtima Ulama 81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuasa simbolik adalah kuasa yang dioperasikan melalui pengucapan dan tindakan dengan maksud membuat orang lain melihat dan percaya pada mode yang dikemas oleh otorisasi autor. Kuasa simbolik bekerja di alam bawah sadar sehingga komunitas atau objek di pusat target tidak sadar. Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai dimensi kehidupan, baik agama, politik, ekonomi maupun budaya. Dalam beberapa tahun terakhir telah ada serangkaian rencana yang mampu hegemoni dan menyentuh emosi rakyat Indonesia. Rangkaian acara dimulai dengan serangkaian aksi atas nama pertahanan Islam yang disebut Aksi Pembela Islam (ABI). Aksi tersebut merupakan respons terhadap pernyataan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang dianggap menghujat saat melakukan kampanye di Kepulauan Seribu.[1]

Adanya kondisi yang memanas yang mengatasnamakan kesakithatian umat Islam membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian mengeluarkan keputusan keagamaan tentang kasus dugaan penistaan agama tersebut. Pendapat dan sikap MUI yang berisikan lima poin itu menyatakan bahwa apa yang sudah diucapkan oleh Ahok adalah penodaan terhadap agama. Keputusan MUI ini mendapatkan respon positif dari beberapa kalangan tokoh Islam dan ulama yang siap mengawal kasus tersebut. Beberapa tokoh Islam dan ulama ini kemudian

[1] Abidatu Lintang Pradipta, dkk, "Analisis Bingkai Pemberitaan Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (Aksi 212) di Media Massa BBC (Indonesia) & Republika", *Informasi: Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol. 48, No. 1 (2018), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhimpun dalam wadah yang bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).[2] Adapun isi dari keputusan MUI dalam menanggapi pernyataan Ahok ialah sebagai berikut:

> 1). Menyatakan secara tegas larangan yang terkandung dalam surah al-Maidah ayat 51 menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, 2). Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib, 3). Setiap orang Muslim wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. 4). Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpim adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Alquran. 5). Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.[3]

Fenomena tersebut yang melatar belakangi terjadinya aksi bela Islam (ABI) pertama yang terjadi pada 14 Oktober 2016. Aksi tersebut berlanjut pada 4 November 2016 dengan jumlah aksi massa yang lebih banyak. Tuntutan aksi ini masih sama dengan aksi yang pertama yaitu meminta Ahok agar ditetapkan sebagai tersangka dan agar dia dibui. Alasan lain yaitu karena penyelidikan tidak dilakukan dengan segera, aksi ini disebut dengan aksi 411. Aksi kali ketiga kemudian berlanjut pada tanggal 2 Desember 2016 yang digawangi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Aksi terakhir ini menjadi puncak dari rentetan aksi bela Islam sebelumnya. Partisipan dalam aksi 212 ini tidak hanya dari Front Pembela Islam (FPI) melainkan terdapat ormas-ormas lain seperti Muhammadiyah, HTI, Aa Gym dan

---

[2] Siti Utami Prismamudti, "Strategi Komunikasi GNPF-MUI dalam Menggalang Massa Aksi 212" (Skripsi--Fakultas Ilmu Dahwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 3

[3] Abdulloh Fuadi, "Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual", *Jurnal Hanifiya* Vol. 1, No. 1 (2018), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf Mansur. Aksi ini disebabkan karena proses penyelidikan terhadap Ahok tidak dilakukan dengan segera dan meminta kembali supaya Ahok diadili seadil-adilnya.[4]

Fenomena ini membuat umat Islam di Indonesia seolah mendapatkan imajiner kolektif baru yang merupakan semangat pertahanan agama. Identitas persaudaraan juga muncul ketika banyak tokoh agama hadir sebagai representasi Muslim yang saleh. Dari situlah muncul perpecahan rakyat DKI Jakarta, ditambah dengan suasana yang bertepatan dengan momentum Pilkada DKI Jakarta. Nuansa membela agama dan membela salah satu pasangan calon menjadi kabur. Komunitas agama baik Muslim maupun non-Muslim dihadapkan pada kondisi di mana mereka harus memilih berdasarkan pada sentimen yang dibangun. Masalahnya bukan lagi tentang pemilihan karena program, melainkan didasarkan pada emosi yang muncul melalui dinamika politik.[5]

Di dalam tubuh Islam sendiri terjadi *fragmentation of religious authority* (fragmentasi atau terpecah-pecah otoritas keagamaan). Fakta ini tampak jelas ketika kontra wacana yang disampaikan oleh Said Aqil Siradj sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak dipatuhi oleh kaum Nahdliyyin. Kontra wacana tersebut berupa anjuran kepada seluruh warga nahdliyyin untuk tidak mengikuti Aksi Bela Islam. Fenomena serupa juga dialami dalam tubuh Muhammadiyah di mana anjuran Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tidak mendapatkan respon positif dari kalangan warga Muhammadiyah.

---

[4] Hurriyah, "Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017", *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 1 (2018), 91.
[5] Irfan Prayogi, "Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017", (Skripsi--Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2018), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjelang pemilihan serentak pada tahun 2019 GNPF-U[6] kembali mengambil peran dan sikap dengan menciptakan sebuah forum yang disebut Ijtima Ulama yang diadakan pada 27 hingga 29 Juli 2019. Yusuf Muhammad Martak[7] sebagai ketua GNPF-U menjelaskan bahwa Ijtima Ulama adalah serangkaian aksi pertahanan Islam. Ulama Ijtima pertama kali menghasilkan rekomendasi untuk Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden (capres) dan Abdul Somad dan Salim Segaf al-Jufri sebagai kandidat wakil presiden (wapres). Namun, akhirnya Prabowo sendiri memilih Sandiaga Salahuddin Uno dengan berbagai pertimbangan.[8]

Melihat Prabowo tidak memilih rekomendasi wakil presiden dari rekomendasi Ijtima Ulama, maka persoalan ini akhirnya dikembalikan kepada para peserta, yaitu ulama, sehingga Ijtima Ulama kedua diadakan pada tanggal 16 September 2019. Dalam hal ini Pertemuan kedua, diputuskan bahwa GNPF-U benar-benar dapat membuktikan kalau Prabowo dan Sandi sepakat menandatangani pakta integritas yang berisi 17 poin. Kami sepakat untuk melanjutkan dukungan yang diberikan kepada Prabowo-Sandi pada ijtima pertama. Seperti aksi yang mencapai volume 3, Ijtima Ulama juga digelar untuk ketiga kalinya di Lor In Hotel, Sentul, Bogor pada 1 Mei 2019. Sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Muhammad Martak bahwa pada Ijtima Ulama ketiga

---

[6] GNPF-MUI berubah nama menjadi GNPF-U ketika Yusuf Muhammad Marta Mennjabat sebagai pimpinan.

[7] Yusuf Martak adalah Vice President PT Energi Mega Persada sejak 2004 hingga 2012, lihat Lapindo bersikukuh Menolak Ganti Rugi Perumahan TAS dalam https://m.detik.com/berita/d/742 637/, diakses 10 Juni 2019. Ia juga termasuk anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Lihat Ijtima Ulama III Libatkan Tokoh Politik, Digelar di Jakarta, https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190429100257-32-390414/. Diakses 10 Juni 2019.

[8] Ijtima' Ulama Rekomendasikan Duet Capres Prabowo-Abdul Somad dalam http://m.cnnindonesia.com/nasional/20180729115834-32-317830. Diakses l 9 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki tiga agenda. *Pertama,* dengarkan pandangan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang merupakan tim pemenangan buat pasangan calon Prabowo-Sandi terkait pemilihan presiden 2019. *Kedua,* mendengarkan tuduhan penipuan yang ditemukan di lapangan. *Ketiga,* menentukan langkah selanjutnya secara konstitusional dan Syariah.[9]

Adapun beberapa poin yang direkomendasikan dari hasil Ijtima Ulama III. *Pertama,* kesimpulan bahwa dalam pemilu benar-benar sudah terjadi beberapa kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. *Kedua,* meminta BPN agar segera mengajukan surat keberatan terhadap hasil pemilu melalui jalur konstitusional. *Ketiga,* mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar mendiskualifikasi pasangan capres Jokowi-Ma'ruf. *Keempat,* mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengawal dan mendampingi gugatan. *Kelima,* menyatakan bahwa melawan kecurangan adalah termasuk *amar ma'ruf nahī munkar.*[10] Dilanjut dengan Ijtima Ulama IV yang menjadi pemungkas dari forum ulama. Dalam forum tersebut dihasilkan kesepakatan yaitu menolak kekuasaan yang dilandasi kecurangan dan kedzaliman.[11]

Melihat nuansa pembelaan terhadap agama semakin mengekspresikan kecenderungannya pada isu-isu politik yang mendukung salah satu pasangan

---

[9] Ijtima' Ulama III dan Misi Prabowo yang Belum Selesai dalam http://m.cnnindonesia.com/ nasional/2019043 0205429 -32-390986. Diakses l 9 Mei 2019.

[10] Ijtima' Ulama Jilid III Hasilkan 5 Keputusan, TKN 01 Bilang Terserah Aja dalam https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/nasional/politik/0105/2019. Diakses 22 Mei 2019.

[11] Sebut Khilafah Wajib Ijtima Ulama IV Usul NKRI Bersyariah dalam https://m.cnnindon-esia.com/nasional/20190805191825-32-418664/. Diakses Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon, penulis membaca bahwa ada kekuatan simbolis dalam fenomena tersebut. Konsep kekuatan simbolis Pierre Bourdieu digunakan untuk membongkar realitas dalam kaitannya dengan aksi sosial. Kekuatan simbolis selalu muncul antara setiap kelas masyarakat untuk mendominasi satu kelas sosial dengan kelas sosial lainnya melalui modal yang dimiliki.[12]

Berangkat dari asumsi bahwa pengaruh kekuatan simbolik dalam pemilihan presiden 2019 sangat besar, penulis tertarik untuk menjadikan fenomena ini sebagai objek studi dalam penelitian ini dengan judul **" Ijtima Ulama Simbolis Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019: Analisis Kuasa Simbolik Pierre Bourdieu"**. Skripsi ini membahas gerakan dan peranan GNPF-U dalam membentuk suatu kuasa simbolik di ruang publik. Kuasa terjadi dengan penguasaan habitus dan modal sehingga memberikan respon afirmatif legitimasi dalam dominasi suatu simbol di lapangan. Dominasi simbol adalah kekuatan yang dapat membuat seseorang mengenali, percaya, memperkuat dan mengubah pandangan mereka tentang realitas dan membentuk realitas mereka sendiri.[13]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gerakan dan peranan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) pada Pemilihan Presiden tahun 2019?

---

[12] Richard Harker, dkk, *Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu,* terj. Pipit Maizier (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), 6.
[13] Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power,* terj. Gino Raymond and Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana gerakan dan peranan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) pada pemilihan presiden tahun 2019 perspektif Kuasa Simbolik Bourdieu?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana gerakan dan peranan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) pada pemilihan presiden tahun 2019.
2. Menjelaskan gerakan dan peranan Gerakan Nasional Fatwa Ulama (GNPF-U) pada pemilihan presiden tahun 2019 perspektif Kuasa Simbolik Bourdieu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya akademisi, bahwa sikap kritis perlu diterapkan dalam segala aspek dan konteks. Penulis mengkaji apa yang awalnya dianggap sepele, tetapi sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar pada kerukunan masyarakat.

2. Manfaat praktis:

Penulis berharap hasil riset skripsi ini mampu memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai kuasa simbolik yang terjadi di masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis mencoba mengulas beberapa diskusi sebelumnya yang berkesinambungan dengan objek material yang penulis adopsi sebagai bahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

referensi. Relevansi objek meterial ditemukan dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Utami Prismamudti dengan judul "Strategi Komunikasi GNPF-MUI dalam Memobilisasi Massa Aksi 212". Skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan paradigma konstruktivis yang merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek empati dan dialektis antara penulis dan responden. Para penulis dalam skripsi ini menggunakan teori komunikasi karena mereka ingin mengetahui strategi komunikasi yang dikembangkan oleh GNPF-MUI. Strategi yang dilakukan oleh GNPF-MUI adalah mengemas isi pesan dengan diksi agama, sehingga menimbulkan kesan semangat jihad. Sedangkan metode yang digunakan adalah *reduancy* atau *repitation* dengan mengundang masyarakat untuk memperhatikan masalah yang sedang dibangun.[14]

Penelitian selanjutnya "Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pemilu DKI Jakarta 2017" yang ditulis oleh Irfan Prayogi. Penelitian ini menggunakan teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aktor memainkan peran dalam membentuk imajinasi politik dan bagaimana meniadakan kontestasi wacana dalam upaya untuk merebut hegemonik di ruang publik.[15]

Jurnal penelitian berikutnya dengan judul "Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Pembela Islam oleh GNPF-MUI 2016-2017". Penelitian ini ditulis oleh Hurriyah menggunakan pendekatan sosiologis melalui teori Kirk dan

---

[14] Siti Utami Primamudti, “Strategi Komunikasi GNPF-MUI dalam Menggalang Massa Aksi 212”, (Skripsi--Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

[15] Irfan Prayogi, “Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017”, (Skripsi--Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Miller. Studi ini bermaksud menjelaskan penyebab munculnya GNPF-MUI, aktor dan motif gerakan.[16]

Tulisan Dian Dwi Jayanto juga menarik perhatian para penulis berjudul "Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertempuran Diskursif: Kontestasi Wacana Politik antara Gerakan Nasional untuk Menjaga Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU)". Alasan minat penulis bukan hanya karena relevansi dengan topik. Namun, pengungkapan fakta dalam pertempuran wacana dan strategi kedua kelompok dalam mengambil legitimasi sebagai representasi wajah umat Islam.[17]

Skripsi yang ditulis oleh Riza Elrafiq Harahap berjudul "Pemikiran Ustadz Bachtiar Nasir Tentang Pemimpin Kafir (Tinjauan GNPF-MUI dan Aksi Damai 212 di Jakarta)". Penelitian ini menggambarkan fakta dan latar belakang munculnya Aksi Damai 212. Penulis tertarik pada hasil penelitian skripsi ini karena sumber data yang diambil sebagai data primer adalah wawancara langsung dengan Bachtiar Nasir sebagai ketua GNPF-MUI.[18]

Dari semua penelitian sebelumnya yang diambil penulis, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam pemilihan tema. Namun, kekuatan simbolis belum secara khusus dibahas dalam studi tersebut. Penulis menjadikan objek GNPF-U untuk mempelajari kekuatan simbolik yang dibuat. Metodologi

---

[16] Hurriyah, Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017", *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 1 (2018).

[17] Dian Dwi Jayanto, "Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursuf: Kontestasi Wacana Politik antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU)", *Jurnal Filsafat*, Vol. 29, No. 1 (2019).

[18] Riza Elrafiq Harahap, "Pemikiran Ustadz Bachtiar Nasir Tentang Pemikiran Kafir (Telaah Terhadap GNPF-MUI dan Aksi Damai 212 di Jakarta)" (Skripsi--Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pendekatan studi sebelumnya juga berbeda dari metodologi dan pendekatan yang digunakan penulis.

Tabel 1.1

Daftar Kajian Terdahulu

Nama	Judul	Jenis	Dipublikasikan	Temuan
Siti Utami Prismamudti	Strategi Komunikasi GNPF-MUI dalam Menggalang Massa Aksi 212. .	SKRIPSI	Oktober 2018	Menjelaskan Strategi Komunikasi yang dipakai oleh GNPF-MUI dalam menggait massa. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa GNPF-MUI sudah memahami secara psikologis khalayak paska aksi 411. Metode yang disampaikan melalui pesan-pesan yang dikemas dengan narasi keagamaan yang memicu sem- angat jihad.
Irfan Prayogi	Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.	SKRIPSI	Desember 2007	Menjelaskan terjadinya pertarungan wacana yag terben- tuk dari masing-masing agensi serta peranan dalam pembentukan imajinasi politik.
Hurriyah	Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI pada Tahun 2016-2017	JURNAL	Agustus 2018	Menganalisis kesamaan identitas publik yang membentuk kesadaran kolektif. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				perekat soliditas masyarakat ialah kesamaan identitas bersama atas nama agama. Jadi peran agama sangat besar dalam memobilisasi massa.
Dian Dwi Jayanto	Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU).	JURNAL	Februari 2019	Menjelaskan pertarungan wacana dalam berupaya merebut makna dalam legitimasinya sebagai representasi umat Islam.
Riza Elrafiq Harahap	Pemikiran Ustadz Bachtiar Nasir Tentang Pemimpin Kafir (Telaah tentang GNPF-MUI dan Aksi Damai 212 di Jakarta).	SKRIPSI	Desember 2017	Menjelaskan strategi yang dilakukan oleh GNPF-MUI dalam menggalang massa. Dalam penelitian ditunjukan bahwa GNPF-MUI sudah mengerti dan faham psikologis khalayak paska aksi 411. Pola komunikasi yag dibangun juga berdasarkan pesan-pesan damai yang memotivasi semangat pembelaan terhadap agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Metode Penelitian

1. Metode

Sebuah karya riset ilmiah yang dituntut untuk menghasilkan data objektif tentu harus menggunakan metode penelitian yang baik dan benar. Metode penelitian berfungsi sebagai penyusunan logika dalam mengambil sebuah kesimpulan. Sehingga penelitian diharapkan mampu menjaga objektivitas dan orisinalitas hasil penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian tidak bersifat asumsif tapi memuat data-data dan pengolahan yang dilakukan secara objektif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode berpikir deduktif dengan berupaya mengumpulkan premis-premis berupa data parsial untuk kemudian dijadikan sebagai kesimpulan yang utuh.

a. Jenis penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tipe deskriptif kualitatif karena penelitian ini menekankan pada aspek makna dengan menganalisis data yang dikumpulkan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.[19] Penelitian kualitatif bermaksud untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis suatu fenomena, tindakan, perilaku dan lain-lain dengan cara penjelasan dalam bentuk kata-kata atau bahasa.[20]

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sumber-sumber yang digunakan sebagai rujukan adalah *library research* sehingga data-data yang diambil bersumber dari jurnal, artikel, skripsi, *website* dan data

[19] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), 3.
[20] Arry Potingku, *Metodologi Penulisan Kualitatif Saja* (Jakarta: Nulisbuku.com, 2016), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendukung yang lain. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis (deskriptif-analisis) fenomena di lapangan secara mendalam dengan pengumpulan data melalui bentuk narasi dan tidak statistik.

b. Sumber data

Penulis mengumpulkan berbagai sumber berupa kajian terdahulu dengan objek kajian yang ada kaitannya dengan tema yang penulis angkat serta referensi-referensi yang mengulas teori kuasa simbolik Bourdieu. Adapun beberapa sumber data tersebut adalah *website* yang menjelaskan fenomena dan menghadirkan fakta mengenai gerakan GNPF-U menjelang dan sampai selesai pemilihan umum 2019. Sedangkan jurnal, artikel, buku dan skripsi adalah yang membahas mengenai teori kuasa simbolik maupun fakta mengenai GNPF-U. Dalam hal ini penulis mengklasifikasi sumber data berdasarkan otoritasnya menjadi dua macam.

1). Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh melalui sumber utama secara langsung. Dalam hal ini sumber yang dimaksud meliputi, buku, jurnal dan skripsi, dan *website*.[21] Temuan yang ditemukan penulis termasuk buku-buku karya asli Bourdieu yang membahas kekuatan simbolis, jurnal dan *website* yang memiliki relevansi dengan objek kajian yang dipelajari oleh penulis, yaitu tentang kekerasan simbolik dan fakta tentang GNPF-U.

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Data skunder

Data skunder merupakan data penunjang untuk menambahkan sumber data. Secara umum dapat juga dikatakan data yang tersusun berbentuk gambar-gambar.[22] Dalam penelitian ini data pendukung juga berupa artikel, *website*, jurnal, buku, skripsi dan data pendukung lainnya yang berhubungan dengan tema kajian penulis.

c. Metode pengolahan data

Langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dikumpulkan untuk digunakan sebagai laporan penelitian. Teknik pengolahan data ini menggunakan metode filosofis-sosiologis. Adapun beberapa langkah pemrosesan yang dilakukan penulis:

1). Melakukan analisis data serta memverifikasi keaslian data secara metodis dan sistematis.

2). Menyaring makna melalu sampel data yang sudah terkumpul dan dianalisis oleh penulis sebelumnya.

3). Membuat laporan dari hasil penelitian secara metodis dan sistematis.

2. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus[23] dengan menggunakan pendekatan sosiologis-filosofis. Upaya yang dilakukan adalah mengamati fenomena sosial terutama praktik sosial berupa konstruksi kuasa simbolik secara

[22] Sumadi Suryabrata, *Metode Penulisan* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.
[23] Studi Kasus merupakan model penulisan yang lebih menekankan pada suatu kasus untuk menerangkan, mempelajari dan menginterpretasi. Arry Pongtiku *Metode Penulisan Kualitatif Saja* (Jakarta: Nulisbuku.com, 2016), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung yang dilakukan oleh GNPF-U selama menjelang Pemilihan umum serentak, lebih spesifik sejak munculnya rentetan Ijtima Ulama yang dilakukan oleh GNPF-U dalam pemilihan presiden. Hasil pengamatan tidak semata-mata disajikan secara mentah melainkan dilakukan proses analisis secara filosofis untuk memeroleh makna mendalam dengan menggunakan pisau analisis teori kuasa simbolik Pierre Bourdieu.

3. Teori

Teori adalah seperangkat konstruksi dan proposisi yang saling terkait dan menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Teori bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.[24] Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kuasa simbolik Pierre Bourdieu untuk menganalisis gerakan "Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama" (GNPF-U) sebagai objek material. Kuasa secara umum menurut Santoso dibedakan menjadi tiga pengertian. *Pertama,* kuasa sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor. *Kedua,* kuasa dimaknai sebagai sebuah produk atau hasil kerjanya struktur. *Ketiga,* kuasa sebagai jaringan sosial antara aktor dan struktur.[25] Teori ini menjelaskan bagaimana pihak yang mempunyai modal mampu menghegemoni secara tidak sadar kepada pihak yang didominasi.[26] Melalui kuasa modal yang dimiliki pihak *superior* mampu menciptakan simbol-simbol yang dianggap benar dan diakui sebagai sesuatu yang sudah seharusnya oleh pihak *inferior*. Dominasi simbol adalah kekuatan yang membuat orang mengenali,

[24] W.Gulo, *Metodologi Penulisan* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 5.
[25] Nanang Martono, *Kuasa Simbolik di Sekolah ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 38.
[26] Harker, dkk, *Pengantar Paling,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percaya, memperkuat dan mengubah pandangan mereka tentang dunia dan menciptakan dunia itu sendiri.[27]

Kuasa simbolik berfungsi dengan bantuan instrumen yang mendukung yaitu adanya agen yang menggunakan kuasa simbolik dan ada objek yang menjadi sasaran tindakan aktor. Sasaran tersebut tidak tahu kalau mereka menjadi sasaran. Agen bisa sadar atau bahkan tidak sadar bahwa mereka melakukan kekuasaan simbolik. Dalam strukturalisme generatifnya, Bourdieu menjelaskan bahwa dalam praktik sosial setiap hubungan sederhana antara individu dan struktur melibatkan habitus, arena, dan modal. Hubungan antara habitus yang berlipat-lipat dengan penguasaan modal ditambah dengan arena pertempuran, kemudian menghasilkan praktik.[28]

Diagram 1.1

Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu

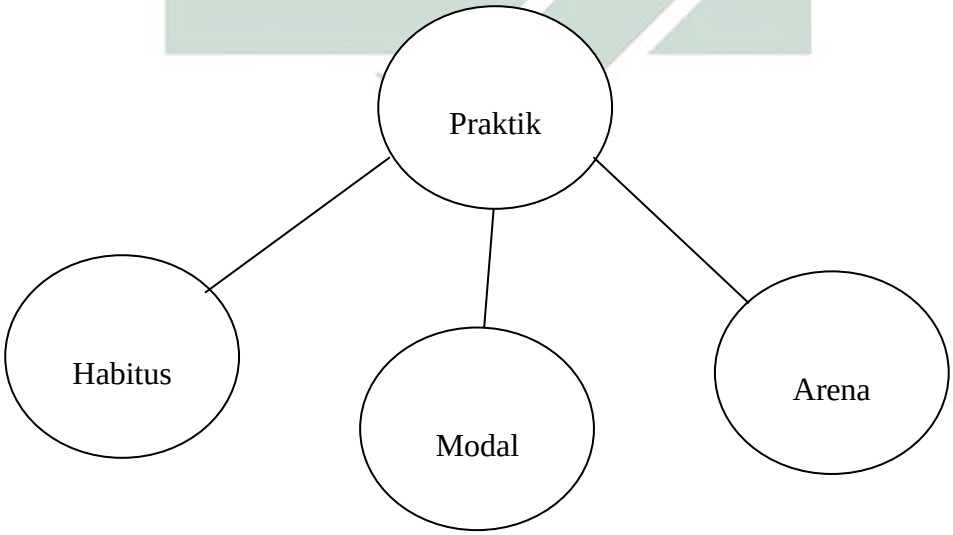

[27] Bourdieu, *Language and Symbolic*, 170.
[28] Dwizatmiko, "Kekuatan Simbolik Menurut Pierre Bourdieu: Telaah Filosofis" (Skripsi--Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Habitus adalah salah satu konsep dasar yang diprakarsai oleh Bourdieu, yaitu sistem yang kokoh dan tahan lama, disposisi yang dapat berubah atau berubah. Habitus adalah struktur yang distruktur tetapi juga berpengaruh sebagai struktur yang berfungsi untuk penataan struktur. Melalui habitus, Bourdieu ingin menjelaskan prinsip-prinsip secara mendasar dalam kehidupan sosial sehari-hari dan tatanan yang menyertainya. Habitus didefinisikan sebagai disposisi (skema persepsi, pemikiran dan tindakan) yang diperoleh dan bertahan lama.[29] Seperti Karl Marx, Bourdieu percaya bahwa modal adalah sumber kekuatan. Namun, Bourdieu memiliki pandangan yang lebih luas tentang modal. Modal dalam teori Bourdieu dapat dibagi menjadi empat jenis. Yaitu, modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik.[30] Sedangkan arena adalah ranah di mana setiap aktor berinteraksi dan bertempur. Namun, kapasitas interaksi sangat ditentukan oleh modal.[31]

Dalam fenomena Ijtima Ulama, penulis melihat pembentukan simbol-simbol yang memiliki kekuatan hegemonik. Melalui modal yang dimiliki dan habitus yang menjadi struktur dalam pola kehidupan, Ijtima Ulama mampu menyusun pola baru di arena sosial. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kekuatan simbolik sebagai pisau analisis problem akademik yang menjadi objek penelitian.

---

[29] Ibid., 69.
[30] Nanang Martono, "Dominasi Kekuatan dalam Pendidikan: Tesis Bourdieu dan Foucault tentang Pendidikan", *Jurnal Interaksi*, Vol. 8, No. 1 (2014), 4.
[31] Dwizatmiko, “Kuasa Simbolik”, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sistematika Pembahasan

Dalam studi ini penulis membagi laporan penelitian menjadi lima bab, masing-masing memiliki diskusi yang berbeda dengan bab-bab lainnya. Pengaturan sistematisasi sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan sebagai latar belakang masalah akademik, perumusan masalah, tujuan penelitian, penggunaan penelitian, tinjauan literatur, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan perspektif teoretis yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Teori yang penulis ambil adalah pemikiran Bourdieu tentang kekuatan simbolik.

Bab III menjelaskan fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh penulis terkait dengan fenomena Ijtima Ulama.

Bab IV berisi analisis fakta menggunakan teori kekuatan simbolik Pierre Bourdieu.

Bab V adalah penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran kepada penulis selanjutnya. Pada bagian terakhir ini, lampiran yang terkait dengan skripsi ini dimasukkan, termasuk daftar pustaka dan riwayat hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SIMBOLISASI FATWA DAN KUASA SIMBOLIK

A. Konstruk Fatwa

Fatwa memiliki urgensi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat agama, termasuk dalam Islam. Mempertimbangkan dua pedoman utama dalam Islam, yaitu Alquran dan Hadits yang masih bersifat global, tentu membutuhkan penjelasan rinci melalui studi kritis dan analitis sehingga umat Islam dapat mengetahui pokok permasahannya. Fatwa memiliki dua fungsi, pertama adalah fatwa sebagai jawaban hukum *(legal opinion)*. Kedua, fatwa tidak mengikat.[1] Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.[2]

Secara etimologis fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwā*.[3] Menurut Ibn Mandzur, kata fatwa adalah bentuk mashdar dari kata *fatā, yaftū, fatwan* yang berarti muda, baru, penjelasan dan pencerahan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat al-Fuyami, yang menyatakan bahwa *al-fatwā* berasal dari kata *al-fatā* yang artinya pemuda yang kuat sehingga seseorang yang mengeluarkan fatwa disebut mufti karena diyakini memiliki kekakuan dalam memberikan penjelasan

[1] Mohammad Fateh, "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2 (2018), 156.
[2] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 275.
[3] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab - Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1034.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jawaban atas masalah yang dihadapi sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.[4]

Dalam pengertian secara terminologis, sebagaimana dijelaskan oleh Zamakhsyari, fatwa adalah penjelasan hukum syarak tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftā* yaitu keterangan-keterangan tentang hukum syarak yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi fatwa adalah menerangkan hukum syarak dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perseorangan atau kolektif[5]

Dari beberapa pengertian di atas tersebut terdapat dua hal penting yang terkandung dalam fatwa sebagai sebuah sifat. Pertama, fatwa bersifat responsif yaitu merupakan jawaban hukum *(legal opinion)* yang dikeluarkan setelah adanya pertanyaan atau permintaan fatwa. Kedua, fatwa sebagai jawaban hukum *(legal opinion)* tidak bersifat mengikat. Artinya peminta fatwa baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan.[6]

Dalam tataran praktik fatwa dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu fatwa kolektif dan fatwa personal.

---

[4] Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsa, 2008), 19.
[5] Ibid., 20.
[6] Mohammad Fateh, "Konstruksi Filosofis, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fatwa kolektif

   Fatwa kolektif merupakan fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh kelompok atau lembaga yang memiliki otoritas dalam fatwa. Fatwa kolektif ini harus bebas dari pengaruh tekanan politik. Di Indonesia yang tergolong dalam kelompok fatwa kolektif ialah Majelis Ulama Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilann Agama Islam Departemen Agama, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail daan lainnya.[7] Fatwa kolektif dipandang sebagai bentuk ijtihad modern yang dianggap ideal, karena proses perumusannya didasarkan pada berbagai disiplin keilmuan.[8]

2. Fatwa Personal

   Fatwa personal merupakan fatwa yang dihasilkan dari proses penelitian dan penelaahan yang dilakukan seseorang. Biasanya fatwa personal ini banyak memberikan warna pada fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasi kajian mendalam terhadap persoalan yang akan dikeluarkan fatwa.[9]

Alexandre Caero membagi fungsi fatwa menjadi empat macam, antara lain: fatwa sebagai instrumen hukum, instrumen sosial, wacana politik dan sebagai doktrin hukum. Fatwa sebagai instrumen hukum menjadi bagian dari

---

[7] Rohadi Abdul fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 40-41.
[8] Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 158.
[9] Ibid., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses peradilan, dalam fungsinya sebagai instrumen sosial fatwa memiliki kontribusi dalam menjaga stabilitas sosial antara hukum dan masyarakat dengan syarat organisasi formal dan informal memiliki hubungan selaras dengan pemerintah. Sedangkan dalam fungsinya sebagai pengaruh secara politik dan doktrin, misalnya ketika ia digunakan untuk memberikan status hukum kepada umat Islam yang murtad.[10]

B. Simbol dan Tanda

Peirce mengemukakan bahwa makna tanda yang sebenarnya adalah mengemukakan sesuatu. Peirce menyebut apa yang dikemukakan oleh tanda, apa yang diacunya dan apa yang ditunjuknya sebagai objek dia juga menyebutnya *representamen.* Tanda mengacu pada suatu acuan, ia menjadi media representasi sebagai fungsi utamanya. Representasi akan terlaksana melalui bantuan sesuatu misalnya kode. Sesuatu yang diperlukan agar tanda bisa berfungsi oleh Peirce disebut sebagai *ground*.[11]

Titik sentral kajian Peirce adalah trikotomi diantara tanda *(representamen)* dan objeknya melalui *interpretan*. *Representamen* adalah sesuatu yang dapat ditangkap secara pancaindra manusia. Kehadiran tanda tersebut mampu membangkitkan *interpretan* sebagai suatu tanda lain yang ekuivalen dengannya dalam benak seseorang *(interpreter).* Jadi, penafsiran makna oleh pemakai tanda terpenuhi ketika *representamen* telah dikaitkan dengan objek.

---

[10] Alexandre Caero, "The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of *Iftā*: A Diachronic Study of Four *Adab al-fatwā* Manuals", *The Muslim Word,* Vol. 96 (2006), 21.
[11] Panuti Sudjiman, dkk, *Serba-Serbi Semiotika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan objek yang diacu oleh tanda merupakan sebuah konsep yang dikenal oleh pemakai tanda sebagai realitas atau apa saja yang dianggap ada.[12]

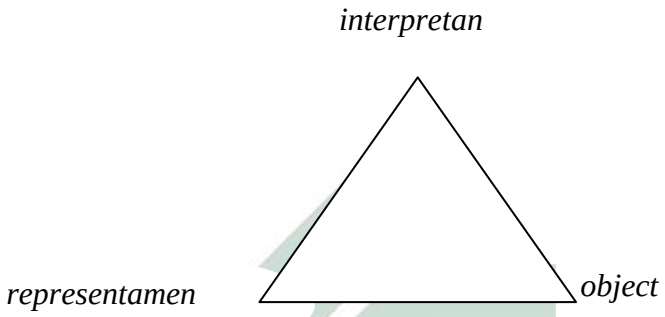

Dalam proses triadik tersebut terdapat proses semiosis dan hubungan tidak pernah putus, yakni *interpretan* akan berkembang menjadi *representamen* dan seterusnya. *Interpretan* adalah apa yang diproduksi tanda dan di dalam kuasi-pikiranlah yang jadi penginterpretasinya, namun ia juga dapat difahami sebagai *representamen*. Sehingga akan terjadi proses perkembangan dalam interprestasi yang tidak berkesudahan sesuai dengan perkembangan kurun waktu yang ada.[13]

Pierce mengklasifikasikan tanda ke dalam tiga tipe, yaitu ikon, indeks dan simbol. Ikon adalah tanda yang memiliki kemiripan sebagaimana bisa dikenali oleh pemakainya. Indeks adalah tanda yang memiliki keterikatan fenomenal dan eksistensial diantara *representamen* dan objeknya. Sedangkan simbol adalah tanda yang bersifat arbitrer dan konvensional.[14]

---

[12] Muhammad Wasith Albar, "Analisis Semiotik Charles Sander Pierce Tentang Taktik Kehidupan Manusia: Dua Karya Kontemporer Putu Sutawijaya" *Lensa Budaya*, Vol.13, No.2 (2018), 127.
[13] Umberto Eco, *Teori Semiotika Signifikasi, Teori kode, serta Teori Produksi Tanda* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2015), 99.
[14] Kris Budiman, *Semiotika Visual (Konsep Isu dan Problem Ikonisitas)* (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, simbol merupakan salah satu pembagian trikotomi tanda dalam pandangan Pierce. Simbol menurut semiotika Pierce adalah tanda yang mengacu pada objek yang digambarkan oleh suatu hukum biasanya berupa asosiasi ide umum karena sifatnya konvensional. Pengertian simbol ini sama halnya definisi Saussure terhadap tanda.[15]

Oleh karena itu, simbol memiliki arti penting dalam masyarakat global, sebab setiap interaksi maupun komunikasi selalu menggunakan simbol-simbol yang menyediakan perangkat tanda untuk memudahkan terjadinya kesepahaman atau saling pengertian. Simbol memiliki beragam varian tafsir diantaranya simbol diartikan sebagai wadah berkumpulnya makna-makna, simbol sebagai representasi kebenaran dan ada yang memandang bahwa simbol berpartisipasi dalam realitas.[16]

Secara etimologi, simbol berasal dari kata Yunani yaitu *symbolos* yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu perihal kepada seseorang atau orang lain. Dari perspektif interaksionisme simbolik, simbol merupakan media dalam mempelajari dan memahami interaksi. Menurut Jazuli, teori interaksionisme simbolik merupakan teori yang mempelajari tentang interaksi antar individu manusia melalui pernyataan simbol, sebab esensial interaksi simbolik terletak pada komunikasi melalui simbol-simbol yang bermakna. Interaksionisme simbolik meletakkan tiga landasan aktivitas manusia dalam memahami kehidupan sosial. Pertama sifat individu, kedua interaksi dan ketiga

[15] Kisno Umbar, "Kajian Semiotika C.S Pierce Dalam Kesenian Bantengan (Upaya Revitalisasi Nilai-Nilai Kesenian Daerah Malang)", artikel dipresentasikan dalam Konfrensi Internasional Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah Indonesia (2015), 7.
[16] Radita Gora, *Hermeneutika Komunikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

interpretasi. Substansi teori ini adalah manusia merupakan makhluk bersimbol untuk itu manusia hidup dalam lingkungan simbol serta menanggapi hidup dengan simbol. Melalui simbol manusia memiliki kemampuan dalam menstimulus orang dengan cara yang berbeda dengan stimulus orang lain tersebut. Melalui komunikasi simbol-simbol dapat dipelajari arti nilai-nilai. Simbol, makna dan nilai selalu berhubungan dengan manusia.[17] Perubahan atau perbedaan makna dan simbol menunjukkan kemampuan manusia dalam "mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi".[18]

F.W. Dillistone menunjukkan bahwa simbol mengandung tiga aspek pokok, yaitu : 1) sebuah kata, barang, objek, tindakan, peristiwa, pola, pribadi atau hal yang konkret. 2) yang mewakili, menggambarkan, mengisyaratkan, menandakan, menyelubungi, menyampaikan, menggugah, mengungkapkan, mengingatkan, merujuk kepada atau berdiri menggantikan, mencorakkan, menunjukkan atau berhubungan dengan atau bersesuaian dengan, menerangi, mengacu kepada, mengambil bagian dalam, menggelar kembali atau berkaitan dengan; 3) sesuatu yang lebih besar atau tertinggi atau terakhir: sebuah makna, realitas, suatu cita-cita, nilai, prestasi, kepercayaan masyarakat, konsep dan suatu keadaan. Aspek pertama merupakan simbol dan aspek ketiga merupakan *referen* dimana antara yang satu dengan yang lain saling bergantung. Ketika simbol hadir

[17] Vera Setia Pratama, "Kajian Makna Simbolik Tari Lawet di Kabupaten Kebumen" (Skripsi--Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2016), 21.
[18] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*, terj. Alimandan (Yogyakarta: Kencana, 2008), 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sebuah kata, gambar, objek yang bersifat umum dan dapat dicerna oleh pancaindra, saat itulah *referen* seolah menunggu untuk memberikan makna.[19]

Diantara kebutuhan dasar manusia dalam hidupnya adalah kebutuhan simbol. Proses terjadinya simbol diperoleh ketika subjek berhadapan langsung dengan realitas. Simbol atau makna merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Simbol yang dimaksud tidak hanya berupa benda melainkan sebuah interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Simbol adalah segala sesuatu (benda material, peristiwa, tindakan, ucapan, dan gerakan manusia) yang menandai atau mewakili sesuatu yang lain atau segala sesuatu yang telah diberi makna tertentu.[20]

Banyak yang selalu mengartikan bahwa simbol sama dengan tanda. Sebetulnya, tanda berkaitan langsung dengan objek, sedangkan simbol memerlukan proses pemaknaan secara intensif setelah dihubungkan dengan objek. Dengan kata lain simbol lebih substantif dari pada tanda. Dalam Pierce, simbol merupakan salah satu kategori tanda sehingga simbol diartikan sebagai tanda yang mengacu pada objek tertentu di luar tanda itu sendiri. Digunakannya simbol dalam setiap masyarakat termasuk dalam fenomena pemilihan presiden 2019 dapat menimbulkan rangsangan pemikiran. Dan simbol-simbol yang muncul akan saling berkaitan satu sama lain sehingga dapat menghasilkan pemaknaan yang baru. Pada dasarnya simbol merupakan akumulasi yang dihasilkan dari gambaran pemikiran manusia, dan dituangkan dalam interaksi dengan alam dan sosial budanyanya.

---

[19] Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu Menyingkap Kuasa Simbol* (Yogyakarta: Jalasutra, 2014),117-118.
[20] Pratama, “Kajian Makna”, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ernst cassier, manusia adalah hewan yang simbol *(animal syimbolicum).* Pemikiran dan tingkah laku simbolis merupakan ciri khas manusia dan menjadi dasar seluruh kemajuan budaya. Kebudayaan adalah dunia yang penuh simbol, tempat manusia dapat membaca dan menemukan ekspresi dinamisnya.[21] Bagi Bourdieu sistem simbolik senantiasa dihubungkan dengan konsep kuasa simbolik. Bourdieu mengklasifikasi sistem simbolik dan fungsinya menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Sistem simbolik sebagai struktur-struktur yang menstruktur *(structuring structures).* Sistem simbolik seperti berawal dari tradisi filosofis neo-Kantian, Sapir-Whorf atas bahasa dan sosiologi pengetahuannya Durkheim. Sistem simbolik *structuring structures* menunjuk pada cara-cara untuk mengetahui, menata dan memahami dunia sosial. Segala bentuk pengetahuan yang berbeda seperti mitos, bahasa, seni dan agama merepresentasikan cara-cara yang berbeda pula dalam menerangkan dunia sosial. Dalam tradisi ini, objektivitas makna ditentukan oleh persetujuan atau konsensus dari para subjek penafsir. Fungsinya tak lain untuk melatih kerja kesadaran.
b. Sistem simbolik sebagai struktur-struktur yang terstruktur *(structured structures).* Sistem simbolik seperti ini merupakan semesta tanda yang dihubungkan dengan makna struktur terdalam. Sistem makna terdalam ini berfungsi sebagai instrumen komunikasi dan instrumen pengetahuan. Apa yang menjadi target akhir ialah integrasi sosial.

[21] Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2006), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sistem simbolik sebagai instrumen dominasi, penegasan Bourdieu bahwa sistem simbolik sebagai instrumen dominasi memberikan ciri khas tersendiri bagi orientasi teoretiknya. Semesta tanda yang diproduksi oleh simbolis memberikan penyatuan bagi kelompok-kelompok sosial dominan untuk menyebarkan kemampuan kode-kode pemahaman dan perilaku kepada kelompok-kelompok yang didominasi. Akhirnya mereka yang berada di posisi subordinat tidak dipersenjatai dengan habitus (kebiasaan) yang memungkinkan mereka menciptakan kode simbolik sendiri. Mereka yang didominasi menerima secara sukarela pembedaan jenjang sosial yang diproduksi oleh kelompok dominan. Dengan begitu, sistem simbolik merepresentasikan fungsi politis tertentu.[22]

[22] Fashri, *Pierre Bourdieu*,119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema 2.1

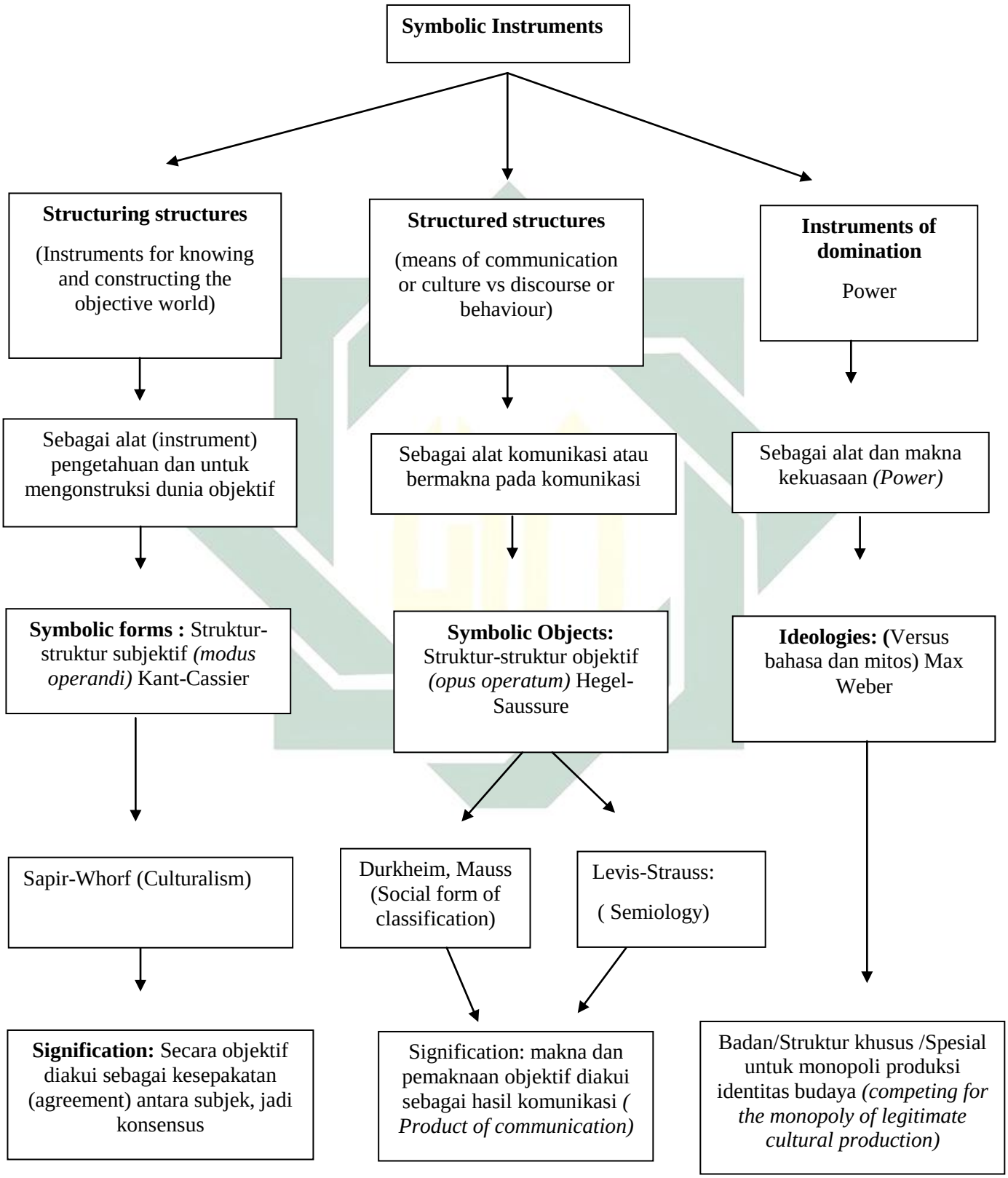

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Simbol merupakan medium yang menjadi perantara dalam memaknai sesuatu, memproduksi dan mengubah makna. Sistem simbol mampu melakukan semua ini karena ia beroperasi sebagai sistem representasi. Lewat simbol (bahasa, wacana, gambar, dan semacamnya) manusia mengungkapkan pikiran, konsep dan ide-ide tentang sesuatu. Namun, sistem representasi tidak selalu menampakkan realitas yang sebenarnya, ia juga berperan membelokkan tanda.[23]

C. Kuasa Simbolik Pierre Bourdieu

Bourdieu secara bergantian menggunakan istilah "kekuatan simbolik", "dominasi simbolik", dan "kekerasan simbolik" untuk menunjuk hal yang sama.[24] Ketiga istilah ini digunakan oleh Bourdieu untuk menekankan aspek-aspek berbeda dari satu fenomena tunggal, yaitu kesalahan dalam pengenalan habitus terhadap realitas yang semula sahih dan terberi. Dengan demikian, kemampuan untuk menjamin kesalahan identifikasi adalah bentuk kekuatan. Dalam arti lain, kemampuan semacam ini juga merupakan dominasi dan kekerasan karena secara halus "dipaksa" cara tertentu untuk memahami kenyataan sehingga pihak-pihak tertentu mendapatkan lebih banyak manfaat sementara yang lain dirugikan.[25]

Konsep kuasa simbolik yang dikemukkan oleh Bourdieu sebetulnya dapat difahami dari bagan pandangan praksis teoritis tentang bahasa *(syimbolic instrument)* yang telah penulis paparkan di atas pada skema 2.1. Berdasarkan skema *symbolic instrument* terlihat jelas dalam sintesis pertama, bahasa sebagai

---

[23] Fashri, *Pierre Bourdieu*, 21.
[24] Thompson, (ed) Introduction dalam Bourdieu *Outline of A Theory of Practice* (Cambrigde: Cambridge University Press, 1995), 23.
[25] Indi Aunullah, “Bahasa dan Kuasa”, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat untuk membangun ilmu pengetahuan, dan sebagai alat untuk *language as instrument of knowledge, constructing the objective world.* Dalam karyanya Bourdieu menyatakan bahwa:

> Symbolic Power is a power of constructing reality, and one which tends to establish a gnoseological order. The immediate meaning of the world (in particular world or social world).[26]

Berdasarkan pernyataan di atas, tampak bahwa kuasa simbolik adalah kekuatan untuk membentuk realitas dan cenderung membentuk tatanan *gnoseologis*. Makna langsung dunia (dunia tertentu dan dunia sosial). Bourdieu juga mendefinisikan kekuatan simbolis sebagai "kekuatan untuk menentukan instrumen pengetahuan dan ekspresi realitas sosial secara semena, tetapi kesemenaannya tidak disadari.[27]

Kuasa simbolik ini terjadi pada dua sisi. Di sisi obyektif, dunia sosial adalah kenyataan yang memiliki struktur lembam. Materi yang didistribusikan atau objek simbolik tidak diklasifikasikan berdasarkan struktur kelas. Kepemilikan benda-benda material dan simbolis akan menciptakan lingkungan sosial yang berbeda untuk setiap kelas, dan pada saat yang sama menciptakan habitus yang berbeda. Di sisi subyektif, persepsi agen dan apresiasi terhadap dunia sosial juga memiliki struktur homologis dengan dunia sosial yang objektif. Ini terjadi melalui kinerja habitus yang mewakili praktik, representasi, klasifikasi, dan evaluasi.[28] Sebuah diskursus memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas, yang membuatnya diakui sebagai sesuatu yang wajar dan alami, karena realitas itu

---

[26] Pierre Bouedieu, *Language and Symbolic Power*, terj. Gino Raymod and Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991), 166.
[27] Ibid., 168
[28] Pierre Bourdieu, *In Other Word, Essays Toward a Reflexive Sociology*, terj. Mattew Adamson (California, Standford University Press, 1990),132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri secara alami disalahpahami melalui skema habitus yang pada gilirannya juga distruktur oleh realitas sosial.[29] Dalam pengertian ini, modal simbolik memperoleh kekuatannya karena menstruktur dan distruktur oleh realitas.[30]

Mengklarifikasi makna instrumen simbolik, Bourdieu merumuskan kekuatan simbolik dengan menggabungkan perspektif tiga tradisi. *Pertama,* tradisi neo-Kantian yang memandang bentuk simbolis (seperti mitos, bahasa, seni, sains, agama, dll.) Sebagai sarana untuk mengetahui dan menciptakan dunia benda. Dengan demikian, tradisi yang diwakili oleh Humboldt, Cassirer, Sapir-Whorf, Erwin Panofsky, Durkheim, dan Radcliffe-Brown mengakui aspek aktif dari pengakuan manusia.[31] Berbeda dengan Kant yang meyakini bahwa kategori pengetahuan yang berkontribusi membentuk objek bersifat transendental dan universal.[32] Dalam tradisi neo-kantian, khususnya Panofsky dan Durkheim, bentuk-bentuk simbolis yang merupakan bentuk-bentuk klasifikasi realitas dipandang sebagai "bentuk historis" dan "bentuk sosial", yaitu, sewenang-wenang, relatif terhadap kelompok-kelompok tertentu, dan ditentukan secara sosial. dan secara historis. Menurut mereka, "objektivitas makna dunia ditentukan oleh kesepakatan penataan subjektivitas". Dengan kata lain, makna dunia adalah konsensus.[33] Konsensus simbolis ini, terutama di Durkheim dan Radcliffe-Brown, memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam memastikan integrasi masyarakat.

---

[29] Ibid., 138.
[30] Bourdieu, *Language and Symbolic*, 166.
[31] Ibid., 164.
[32] Budi Hardiman, *Filsafat Modern, Dari Machiavelli sampai Nietzsche* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 139.
[33] Bourdieu, *Language and Symbolic*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi kedua, yang diwakili oleh Saussure, strukturalisme, dan sampai batas tertentu Durkheim dan Panofsky, juga melihat bahwa bentuk-bentuk simbolik membantu membentuk dunia. Perbedaannya adalah, jika tradisi pertama lebih menekankan pada aspek produktif dari kesadaran, sedangkan tradisi kedua lebih menekankan pada kesadaran dan bentuk simbolik sebagai sesuatu yang dibentuk dan terstruktur.[34] Dalam strukturalisme Levi-Strauss, sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, bentuk simbolis mendapatkan kembali status universal dengan berasal dari mekanisme pikiran manusia.

Ketiga, tradisi Marxian dan Weberian yang juga memandang bahwa bentuk simbolik fungsional. Tetapi tidak seperti Durkheim yang menekankan fungsi integrasi, Marx dan Weber menekankan fungsi politik dari bentuk simbolik sebagai alat dominasi. Mereka menghubungkan produksi simbolis dengan kepentingan kelompok dominan untuk membenarkan dominasi mereka atau, dalam istilah Weber, "penjinakan pihak yang terdominasi".[35]

Dengan mensintesis ketiga tradisi ini, Bourdieu secara simultan mengatasi tiga dikotomi. *Pertama*, dengan menganggap bentuk-bentuk simbolis menstruktur dan distruktur oleh realitas pada saat yang sama, ia menggabungkan aspek-aspek aktif kesadaran dalam idealisme neo-kantian dan aspek-aspek pasifnya dalam materialisme dan strukturalisme. *Kedua*, ia menggabungkan penekanan pada integrasi dan konflik dalam masyarakat dengan mengasumsikan bahwa bentuk-bentuk simbolik secara simultan memiliki dua fungsi: sosial dan

[34] Ibid., 164-166.
[35] Ibid., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik, integrasi dan dominasi, penyatuan dan diferensiasi. Bentuk simbolis menyatukan masyarakat dan juga memisahkannya ke dalam kelas yang berbeda. Justru keberadaan persatuanlah yang memungkinkan konflik dan perbedaan.[36] *Ketiga,* menggabungkan penekanan pada aspek material dan simbolik. Baginya, dua aspek dunia sosial ini berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Tidak ada bentuk materi murni, karena semuanya diakui oleh agen melalui bentuk simbolik. Sebaliknya, representasi simbolik yang dimiliki oleh agen berakar pada objek material. Ini terlihat, misalnya, dalam pandangannya tentang modal pluralistik, juga dalam pemikirannya tentang kelas yang tidak hanya didasarkan pada distribusi modal material seperti pandangan Marxis ortodoks tetapi juga pada distribusi modal simbolik. Singkatnya, representasi simbolis agen dari realitas material tidak kurang nyata dari realitas material itu sendiri,[37] atau dengan kata lain, tidak mungkin untuk membuat pemisahan yang ketat antara perbedaan "alamiah" dan perbedaan "sosial".[38]

Kemudian, Bourdieu memaparkan akan sumber daya dan efek-efek dari kuasa/ kuasa simbolik itu tidak lain adalah:

> Symbolic power – as a power of constituting the given through utterences of making people see and believe of confirming or transforming the vision of the world and therby action on the world and thus the world itself, an almost magical power which anables one to obtain the equevalent of what is obtained through force (whether physical or economic), by virtue of the specific effect of mobilisation – is power that can be exercised only if it is recognized, that is misrecognized as arbitrary.[39]

---

[36] Ibid., 167.
[37] Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste,* terj. Richard Nice (Cambridge: Hardvard University Press, 1979), 483.
[38] Jen Webb dkk, *Understanding Bourdieu* (Australia: Allen & Unwin, 2002), 83.
[39] Bourdieu, *Language and Symbolic,* 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan di atas menjelaskan, bahwa kuasa simbolis adalah sebagai kekuatan untuk mengonstitusi, membentuk hal-hal yang diberikan melalui ucapan, untuk membuat orang melihat dan percaya, untuk memperkuat atau mengubah cara memandang dunia dan karenanya, bagaimana bertindak terhadap dunia dan dengan demikian mengubah dunia itu sendiri. Kekuatan yang hampir magis yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan hasil yang sama yang diperoleh melalui paksaan (baik fisik atau ekonomi), dengan efek mobilisasi tertentu - adalah kekuatan (praktik kekuasaan) yang dapat dilakukan hanya jika diakui , yaitu, disalahpahami sebagai semena.

Atau dalam kalimat yang lain Bourdieu mengatakan secara singkat, efek *symbolic power* itu menjadi:

> Symbolic power, a subordinate power, is a transformed, i.e misreconizable, transfigured and legitimated form of the other forms of power.[40]
>
> Kuasa simbolik adalah sebentuk kuasa yang dialihkan, yakni dapat disalah-kenali, dialihrupakan dan dilegitimasi dari bentuk-bentuk kuasa yang lain.

Dengan demikian, kuasa simbolik adalah praktik kuasa untuk menentukan cara memahami realitas, dan dengan demikian realitas terkonstruksi dengan sendirinya secara semena, tapi difahami oleh pihak-pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang alamiah dan terberi. Karenanya kuasa ini menggunakan instrumen bahasa, melalui praktik berbahasa, di mana tidak disadari sebagai sebentuk kuasa atau dominasi. Kuasa simbolik adalah hasil proses transformasi dari bentuk-bentuk kuasa lain, yakni kuasa atau tirani yang disalah-kenali.

[40] Ibid., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sketsa Intelektual Pierre Bourdieu

Dalam pemikiran Bordieu, ilmu-ilmu sosial klasik ditandai oleh dua kubu yang saling bertentangan berdasarkan kecenderungan dalam berpikir. Kedua kubu tersebut adalah subjektivisme dan objektivisme. Subjektivisme memiliki pusat keyakinan dan menganggap bahwa agen mampu membentuk dunia sosial serta bebas dalam melakukan tindakannya. Sebaliknya, objektivisme berpandangan bahwa struktur sosial dan logika budaya memiliki kekuatan lebih tinggi dari pada konstruksi, pengalaman dan tindakan agen.[41]

Bourdieu berpendapat baik subjektivisme maupun objektivisme sama-sama tidak memiliki orientasi intelektual yang memadai. Subjektivisme percaya bahwa dunia sosial dibentuk oleh agen dengan kesadaran mereka dalam bertindak. Oleh karena itu pengetahuan tentang dunia sosial harus diperoleh melalui kesadaran agen langsung. Sedangkan dalam pandangan objektivisme, dunia sosial dibentuk melalui hubungan dan kekuatan yang berada di luar kesadaran agen. Hubungan dan kekuatan di luar ini justru menentukan kesadaran dan tindakan agen.[42]

Meskipun jarang terlihat sangat ekstrem, oposisi antara kedua kubu tersebut bersifat total, meluas ke semua tindakan analitis dan memanifestasikan dalam banyak pasangan oposisi: agen-struktur, individu-masyarakat, kebebasan-

[41] Moishe Postone, "Introduction: Bourdieu and Social Theory", dalam Craig Calhoun dkk, *Bourdieu Critical Perspective* (Cambridge: Polity Press, 1993), 3.
[42] Bourdieu, *Language and Symbolic*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

determinasi, kesadaran-ketidaksadaran, simbolik-material, dan serangkaian dikotomi lain yang digunakan untuk menjelaskan realitas sosial.[43]

Dikotomi ini, menurut Bourdieu, adalah salah dan menyesatkan. Kesalahan-kesalahan ini berakar pada intelektualisme dan pola pikir skolastik. Subjektivisme dan objektivisme mengabaikan hubungan subjektif para ilmuwan dengan dunia sosial dan kondisi objektif yang memungkinkan produksi teori dan sains itu sendiri.[44] Pengetahuan ilmiah tentang dunia sosial harus melampaui dikotomi semu antara subjektivisme dan objektivisme, yang sebenarnya adalah dua momen yang saling terkait dan tak terpisahkan. Dunia sosial terbentuk dari hubungan dialektis antara agensi dan struktur, antara struktur subjektif dan struktur objektif, antara internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi internalitas, atau antara penubuhan dan objektifikasi.[45] Dengan melampaui dikotomi ini, Bourdieu ingin mewujudkan strukturalisme genetik, yaitu dengan menelusuri asal-usul dua struktur yang saling berhubungan.[46] Untuk alasan ini Bourdieu memperkenalkan tiga konsep: habitus, arena, dan modal. Ketiga elemen tersebut merupakan kunci pendukung terjadinya praktik kuasa simbolik.

E. Habitus

Habitus adalah konsep sentral Bourdieu dari pendekatn sosiologis yang penuh teka-teki. Konsep ini merupakan kunci orisinalitas sekaligus kontribusinya

---

[43] Indi Aunullah, "Bahasa dan Kuasa Simbolik dalam Pandangan Pierre Bourdieu" (Skripsi--Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2006), 42.
[44] Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice,* terj. Richard Nice (Stanford: Stanford University Press, 1990), 29.
[45] Pierre Bourdieu, *Outline of A Theory of Practice,* tej. Richard Nice (Cambridge: University Press, 1977), 72.
[46] Bourdieu, *In Other,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ilmu sosial. Meskipun ide sentral ini sering disalahfahami, disalahgunakan dan jadi topik perdebatan, secara sangat umum tujuan habitus bertujuan untuk melampaui dikotomi mendalam yang menyusun cara berpikir tentang dunia sosial.[47] Dikotomi yang meliputi hubungan masa lalu, masa sekarang dan masa depan, sosial-individu, objektif-subjektif, dan struktur-agensi.[48] Konsep habitus Bourdieu tersebut merupakan upaya menciptakan agen-agen sosial sebagai individu-individu yang mengonstruk dunia sekelilingnya.[49]

Dalam sejarah intelektual sebenarnya habitus bukan terma baru. Habitus adalah istilah yang sangat tua. Istilah tersebut bisa ditelusuri mulai zaman Aristoteles dan skolastik. Tetapi Bourdieu menggunakan dengan cara yang berbeda dan lebih spesifik. Habitus diartikan sebagai seperangkat disposisi[50] yang mengatur agen dalam bertindak dan bereaksi dengan cara tertentu. Habitus membentuk praktik, persepsi, dan sikap kebiasaan yang teratur dan secara tidak sadar. Disposisi-disposisi yang membentuk habitus tertanam, terstruktur, tahan lama, generatif, dan dapat berpindah atau ditransportasikan.[51] Sederhananya, habitus fokus pada cara agen bertindak, merasakan, berpikir dan menjadi.[52]

Secara formal, Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai properti agen sosial (baik individu, kelompok atau institusi) yang terdiri dari struktur juga

---

[47] Karl Maton, "Habitus", dalam Michael Grenfell, *Pierre Bourdieu Key Consepts* (Durham: Acumen, 2008), 49.
[48] Ibid., 53.
[49] Cheleen Mahar, "Pierre Bourdieu: Proyek Intelektual", dalam Richard Harker, *Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), 45.
[50] Disposisi setidaknya merujuk pada tiga pengertian, pertama ekspresi dari tindakan yang mengorganisir yang dekat dengan makna struktur. Kedua, menunjukkan cara berada, kondisi kebiasaan (teruma berkaitan dengan tubuh), dan ketiga, kecenderungan, tendensi atau kecondongan. Lihat Bourdieu, *Outline of A Theory of Practice*, 214.
[51] Bourdieu, *Language and Symbolic*, 12.
[52] Karl Maton, "Habitus", 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pembentuk struktur.[53] Habitus terstruktur oleh keadaan seseorang yang dulu dan sekarang, seperti pengalaman keluarga dan pengalaman pendidikan. Ia juga merupakan penataan yang membantu membentuk praktik masa sekarang dan masa depan seseorang. Ia adalah struktur di mana ia disusun secara sistematis daripada acak atau tidak terpola. Struktur ini terdiri dari sistem disposisi yang menghasilkan persepsi, apresiasi, dan praktik.[54]

Dengan kata lain, habitus bisa difahami sebagai nilai-nilai dan disposisi-disposisi yang diperoleh dari sejarah kultur agen yang melingkupinya melewati konteks. Nilai dan disposisi tersebut mengizinkan agen untuk merespon terhadap aturan budaya dan konteks dalam cara yang bervariasi. Akan tetapi respon tersebut lebih cenderung ditentukan oleh budaya tempat agen tinggal.[55]

Dalam gaya bahasa yang menjadi ciri khas, Bourdieu memaparkan habitus sebagai sistem disposisi yang tahan lama (*durable*) dan dapat berpindah-pindah *(transposable)*, struktur yang distruktur yang cenderung berfungsi sebagai struktur yang menstrukturkan, yaitu, sebagai prinsip yang menghasilkan dan mengatur praktik dan representasi yang secara objektif disesuaikan dengan hasil tanpa mengasumsikan adanya pengarahan secara sadar kepada tujuan atau penguasaan yang sengaja terhadap upaya yang dibutuhkan untuk mencapainya. Secara objektif "diatur" dan "teratur" tanpa menjadi buah kepatuhan dengan

[53] Bourdieu, *In Other*, 113.
[54] Maton, “Habitus”, 50.
[55] Webb dkk, *Understanding Bourdieu*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan, secara kolektif dapat diselaraskan tanpa menjadi hasil dari tindakan pengaturan konduktor.[56]

Konsep habitus dimulai dari sebuah pengalaman dan teka-teki sosiologis. Secara eksperimental, kita sering merasa bahwa kita adalah agen bebas namun mendasarkan keputusan sehari-hari pada asumsi tentang karakter, perilaku, dan sikap orang lain yang dapat diprediksi. Secara sosiologis, praktik sosial dicirikan oleh keteraturan meskipun tidak secara eksplisit aturan yang mendikte praktik tersebut. Keduanya menimbulkan pertanyaan mendasar yang ingin diselesaikan oleh habitus. Seperti yang dinyatakan Bourdieu, "semua pemikiran saya dimulai dari titik ini: bagaimana perilaku dapat diatur tanpa menjadi produk dari kepatuhan pada aturan?"[57] Dengan kata lain, Bourdieu bertanya bagaimana struktur sosial dan agensi individu dapat direkonsiliasi atau bagaimana struktur subjektif internal dan struktur objektif eksternal bekerja untuk saling membentuk.

Menjawab teka-teki rumit tersebut, Bourdieu menegaskan bahwa Habitus adalah struktur subjektif internal yang diperoleh agen melalui pengalamannya dengan menginternalisasi struktur objektif eksternal dari dunia sosial tempat ia tinggal. Kemudian, melalui habitus ini agen menghasilkan praktik yang pada gilirannya membentuk dunia sosial, atau dengan kata lain, menghasilkan struktur objektif eksternal dengan mengeksternalisasi struktur subjektif internal habitusnya. Habitus adalah struktur yang terbentuk sekaligus membentuk dunia

[56] Bourdieu, *The Logic of Practice*, 53.
[57] Maton, “Habitus”, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial. Dia adalah media dialektik antara struktur subjektif internal dan struktur objektif eksternal.[58]

Singkatnya, habitus adalah produk sejarah yang memproduksi praktik sosial dan kolektif berdasarkan skema yang dihasilkan sejarah. [59] Praktik yang dihasilkan oleh habitus cenderung sama dengan struktur pembentuknya, dan karenanya cenderung mereproduksi struktur pembentuknya. Namun, habitus tidak berarti hanya dipahami sebagai reproduksi mekanis dari struktur pembentukannya, ia lebih merupakan sebagai struktur generatif.[60] Habitus mengonseptualisasi hubungan antara objektif dan subjektif atau luar dan dalam dengan menggambarkan bagaimana fakta-fakta sosial menjadi terinternalisasi. Habitus yaitu subjektivitas yang disosialisasikan dan terwujud secara sosial.[61] Dengan demikian habitus menyatukan struktur sosial objektif dengan pengalaman pribadi subjektif.

Bagi Bourdieu habitus adalah penghubung penting antara serangkaian dualisme yang sering digambarkan oleh pendekatan lain sebagai dikotomis dan menyatukan keberadaan keteraturan sosial dengan pengalaman agensi. Yang terpenting adalah habitus dimaksudkan untuk mendorong agensi untuk berpikir secara relasional. Bourdieu menekankan "hubungan antara" dari pada salah satu/atau". [62]

---

[58] Aunullah "Bahasa dan Kuasa", 44
[59] Bourdieu, *Outline of A Theory*, 82.
[60] Bourdieu *The Logic of Practice*, 55.
[61] Pierre Bourdieu and Wacquant, *An Invintation to Reflexive Sosiology* (Cambridge: Polity Press, 1992), 126.
[62] Maton, "Habitus", 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah ilustrasi, terkait struktur dan aturan sewenang-wenang (arbitrer) diproduksi sebagai habitus yang dinaturalisasi dapat dilihat dalam pola makan daging budaya barat. Sapi, babi, ayam, bebek, kalkun dan domba semuanya disembelih, dikemas dan dikonsumsi sebagai komponen pokok dari makanan barat, sementara hewan domestik seperti kucing, anjing dan hamster (tanpa sadar) tidak termasuk dalam kategori ini. Ketika cerita beredar tentang orang asing makan kucing atau anjing, respon yang sudah pasti muncul adalah salah satu jijik dan ketidakpahaman.[63]

Dalam ilustrasi yang lain, seseorang yang tumbuh dalam keluarga dan lingkungan berbahasa Jawa akan menginternalisasi struktur bahasa Jawa, dengan sopan santun, hierarki, mengunggah, dan intonasi. Struktur ini akan membentuk dan menjadi bagian dari habitusnya. Pada gilirannya, setiap kali orang tersebut menggunakan bahasa Jawa, ia secara simultan mereproduksi struktur pembentuk habitus tersebut. Meski begitu, alih-alih hanya pengulangan mekanis, kalimat-kalimat Jawa beserta sopan santun dan intonasi yang mereka hasilkan tidak pernah persis sama seperti yang mereka alami di masa lalu.[64]

Ada beberapa poin yang diasosiasikan oleh Bourdieu dengan habitus. *Pertama*, pengetahuan (cara kita memahami dunia, kepercayaan dan nilai-nilai) selalu dibangun melalui habitus. *Kedua*, agen cenderung pada sikap tertentu, nilai-nilai atau cara berperilaku karena pengaruh yang diberikan oleh lintasan budaya agen. Disposisi ini berpindah-pindah melintasi beragam bidang (arena). *Ketiga*,

[63] Webb dkk, *Understanding Bourdieu*, 39.
[64] Aunullah, "Bahasa dan Kuasa", 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

habitus selalu dikonstitusikan dalam setiap praktik. Hal itu selalu ditampilkan ketika disposisi bertemu dengan masalah, pilihan, atau konteks tertentu. Dengan kata lain, habitus dapat difahami sebagai *"feel of the game"* dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, habitus beroperasi pada tingkat ketidaksadaran. Sebab, habitus dalam arti tertentu sepenuhnya arbitrer, tidak ada yang alami atau esensial tentang nilai-nilai yang kita pegang, hasrat yang kita kejar, atau praktik yang kita lakukan.

Untuk memahami praktik, maka seseorang harus menghubungkan keteraturan bidang sosial dengan logika praktis agen sosial. "rasa permainan" *(feel of the game)* mereka adalah perasaan untuk peraturan ini. Sumber logika praktis ini adalah habitus. Habitus adalah *feel of the game* sebagai permainan sosial yang diwujudkan dan berubah menjadi sifat kedua.[65]

Dalam artian bukan untuk mengatakan bahwa praktik arbitrer ini tidak termotivasi atau bertindak tanpa ketertarikan. Sebaliknya, semua praktik diinformasikan oleh gagasan tentang kekuasaan, politik, dan kepentingan pribadi. Tetapi agar habitus tertentu berfungsi dengan lancar dan efektif, individu biasanya harus berpikir bahwa kemungkinan yang mereka pilih sebenarnya adalah kebutuhan, akal sehat, alami atau tidak terhindarkan.[66]

Habitus pada dasarnya tidak bersifat kognitif, seperti halnya stok pengetahuan yang difahami oleh fenomenologi sosial. Habitus adalah pengetahuan yang menubuh dalam bentuk postur, kecenderungan, dan disposisi.

---

[65] Bourdieu, *In Other*, 63.
[66] Webb dkk, *Understanding Bourdieu*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu habitus cenderung berada di luar jangkauan kesadaran dan tidak dapat diubah sesuka hati. Pengetahuan yang dipelajari oleh tubuh bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang, tetapi sesuatu yang merupakan orang itu sendiri. Hal ini terutama sangat jelas dalam masyarakat non-literer di mana pengetahuan yang diwariskan hanya dapat diwariskan dalam bentuk yang menubuh.[67] Ini didasarkan pada pandangan Bourdieu bahwa tubuh bukanlah sarana atau pelaksana kehendak dari kesadaran yang terpisah, tetapi tempat untuk menyimpan pengetahuan dan memori dalam suatu indra non-kognitif, dan dalam masyarakat non-sastra di mana pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari tubuh dan hanya dapat diwariskan dalam bentuk afektif.[68]

Habitus bukan bertindak sendiri. Bourdieu tidak mengatakan bahwa agen adalah robot yang diprogram sebelumnya yang menjalankan implikasi dari didikan. Sebaliknya, praktik adalah hasil dari apa yang ia sebut hubungan tidak jelas dan ganda[69] atau tidak sadar antara habitus dan arena.[70]

Secara formal Bourdieu merangkum hubungan ini menggunakan persamaan sebagai berikut:

[(habitus) (kapital)] + arena = Praktik[71]

Persamaan tersebut di atas menjelaskan bahwa praktek adalah hasil dari hubungan antara disposisi seseorang (habitus) dan posisi seseorang di lapangan

[67] Bourdieu, *The logic of practice*, 73.
[68] Aunullah, "Bahasa dan Kuasa", 46.
[69] Bourdieu and Wacquant, *An Invitation to Reflexive*, 126.
[70] Pierre Bourdieu, *Sociology in Question*, terj. Richard Nice (London: Sage Publications, 1993), 76.
[71] Maton, "Habitus", 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(modal), yang sedang bermain dalam arena sosial (arena). Formulasi ringkas ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memahami pendekatan Bourdieu dari tiga alat berpikir utamanya yang saling terkait yakni habitus, modal dan arena.

F. Arena

Pertama kali konsep arena digunakan oleh Bourdieu ialah dalam artikel yang berjudul *Champ Intellectuel et Projet Createur* yang membahas perbedaan pandangan dua pemikir prancis Roland Barthes dan Raymond Picard. Dalam bahasa inggris kata arena berasal dari *field* yang merujuk pada padang rumput. Dalam bahasa Francis kata arena berasal dari kata *le pre*. Namun Bourdieu lebih memilih menggunakan *le Champ* yang digunakan untuk menggarmbarkan antara lain, area tanah, medan perang, dan bidang pengetahuan.[72]

Arena dan habitus selalu saling berhubungan namun kadua kunci tersebut tidak sama. Kalau habitus adalah sejarah yang menubuh dalam agen, maka dunia sosial adalah sejarah yang diobjektifikasi dalam benda dan institusi dalam bentuk struktur dan mekanisme. Praktik dihasilkan dari pertemuan antara kedua sejarah ini; yaitu sejarah dalam tubuh dan sejarah dalam dunia. Tubuh berada dalam dunia sosial juga sebaliknya, dunia sosial berada dalam tubuh dalam bentuk habitus.[73]

Arena dapat dilihat sebagai ruang posisi terstruktur di mana posisi dan keterkaitannya ditentukan oleh distribusi berbagai jenis sumber daya atau modal. Arena merupakan tempat pergulatan di mana individu bersekongkol untuk

---

[72] Patricia Thomson, "Field", dalam Michael Grenfell, Pierre, *Bourdieu : Key Concepts* (Durham: Acumen, 2008), 67-68.
[73] Pierre Bourdieu, *Pascalian Meditations*, terj. Richard Nice (Standford: Standford University Press, 2000), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan atau mengubah distribusi bentuk modal khusus untuknya. Individu yang berpartisipasi dalam perjuangan ini akan memiliki tujuan yang berbeda, beberapa akan berusaha untuk mempertahankan *status quo* sedang yang lain untuk mengubahnya dan peluang yang berbeda untuk menang atau kalah.[74]

Arena budaya dapat diartikan sebagai serangkaian institusi, aturan, ritual, konvensi, kategori, penunjukan, janji dan judul yang merupakan hierarki objektif dan yang menghasilkan dan mengotorisasi wacana dan tindakan tertentu. Tetapi itu juga didasari oleh atau dari konflik yang terlibat ketika kelompok atau individu berupaya menentukan apa yang dibentuk modal dalam arena dan bagaimana modal itu didistribusikan. Bourdieu memahami konsep *field culture* atau arena budaya untuk merujuk pada fluida dan entitas yang dinamis bukan yang statis. Bidang budaya tidak hanya terdiri dari institusi dan aturan tetapi interaksi antara institusi, aturan dan praktik. Jumlah kekuatan yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang tergantung pada posisi orang tersebut dan jumlah modal yang dimiliki. Tentu saja salah satu kelebihan berada di posisi kekuasaan adalah bahwa hal itu memungkinkan kelompok atau agen menanamkan tentang modal asli. Umumnya nilai, atau sebaliknya bentuk modal tertentu ditentukan dalam dan sering terbatas pada bidang tertentu meskipun sering tumpang tindih.[75]

Arena dibentuk dari jaringan relasi antara yang dihuni oleh agen atau institusi. Arena juga berupa sistem kekuasaan antara posisi-posisi ini, yang menentukan apakah suatu posisi dominan, subordinat, atau setara terhadap posisi

[74] Bourdieu, *Language and symbolic*, 14.
[75] Webb, dkk, *Understanding Bourdieu*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, yang ditentukan oleh aksesnya terhadap sumber daya tertentu yang dihargai dan diperebutkan dalam arena tersebut. Dengan demikian, arena selalu merupakan sebuah perebutan, pergulatan, dan perjuangan. Batas sebuah arena dan hubungannya dengan arena-arena yang lain tidak pernah tetap, selalu berubah dan justru menjadi bagian dari pertaruhan yang diperjuangkan. Arena lebih bersifat dinamis karena di dalamnya selalu terjadi perubahan, baik karena pertarungan internal antara berbagai posisi di dalamnya maupun karena pergesekannya dengan arena-arena lain.[76]

Arena-arena ini berada dalam arena kekuasaan, sebuah meta-arena dimana arena-arena yang berbeda dan para agen yang terlibat di dalamnya saling bersaing untuk menentukan prinsip penyusunan hierarki antar arena dan prinsip konversi atau nilai tukar antar jenis modal yang dihargai dalam masing-masing arena.[77] Tentu hubungan hierarki antar arena dan nilai konversi berbagai modal ini bisa bervariasi pada konteks ruang dan waktu yang berbeda. Dan justru hal itu merupakan salah satu hal yang diperebutkan. Tingkat intervensi arena lain dalam suatu arena tergantung pada tingkat otonomi relatifnya.[78]

Habitus dan arena berada dalam hubungan dialektis. Di satu sisi, arena membentuk habitus yang sesuai dengan struktur dan cara kerjanya. Keikutsertaan dalam sebuah arena mengandaikan kepercayaan dan penerimaan begitu saja terhadap segala struktur, aturan, dan nilai sumber daya yang diperebutkan di dalamnya. Metafor “permainan” yang digunakan Bourdieu untuk menunjuk arena

[76] Aunullah, “Bahasa Dan Kuasa”, 48.
[77] Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production*, terj. Randal Johnson (Columbia: Columbia University Press, 1993), 40
[78] Bourdieu, *In Other*, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kiranya dapat menggambarkan hal ini. Seseorang yang terlibat dalam permainan sepakbola, misalnya, begitu saja percaya dan menerima berbagai aturan main di dalamnya (mis. tidak boleh menyentuh bola dengan tangan, tidak boleh melanggar lawan dari belakang, wasit adalah pemimpin pertandingan, dan bahwa memasukkan bola ke gawang lawan adalah sesuatu yang berharga dan harus diperebutkan, dsb.). Kepercayaan ini menubuh dalam habitus agen yang merupakan internalisasi struktur objektif arena. Ia menciptakan logika praktis atau "rasa permainan" pada diri agen, yaitu kemampuan praktis untuk terlibat di dalamnya, dan memberi arti subjektif bagi arena, yaitu bahwa arena itu cukup bernilai untuk diikuti. Kepercayaan praktis ini disebut Bourdieu sebagai doxa, yaitu hubungan ketaatan langsung yang terjadi dalam praktik antara sebuah habitus dan arena di mana ia disesuaikan, penerimaan begitu saja terhadap dunia yang terjadi secara pra-verbal yang berasal dari rasa praktis.[79]

Kepercayaan terhadap aturan dan nilai sebuah serta nilai modal yang diperebutkan di dalamnya juga disebut Bourdieu sebagai *illusio* untuk menekankan bahwa sebenarnya kepercayaan itu tak memiliki landasan natural dan akan terlihat konyol dan tidak masuk akal jika dilihat dari luar arena yang bersangkutan.[80] Di sisi lain, habitus juga membentuk dan mengubah arena sesuai dengan strukturnya. Makna dan nilai yang terobjektifikasi melalui sejarah dalam

[79] Bourdieu, *The Logic of Practice,* 66.
[80] Bourdieu, *Pascalian Meditation,* 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk institusi dan mekanisme hanya aktif sepenuhnya jika dihidupkan kembali oleh habitus dalam bentuk praktik.[81]

G. Modal

Modal merupakan sumber daya yang digunakan agen dalam arena. Bourdieu menjelaskan modal sebagai kerja yang terakumulasi (dalam bentuk terbendakan dan menubuh) yang jika dimiliki secara privat, yakni secara ekslusif oleh agen atau kelompok agen memungkinkan mereka memiliki energi sosial dalam bentuk kerja yang direifikasi maupun yang hidup. Modal yang dimiliki seseorang akan menentukan posisinya dalam struktur arena dan juga kekuasaan yang dimilikinya. Dengan kata lain, modal adalah "prinsip diferensiasi" dan "prinsip hierarkisasi" yang berlaku dalam setiap arena.[82]

Secara umum, Bourdieu membedakan empat jenis modal: ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Keempat bentuk modal ini bisa saling dikonversikan dan diwariskan pada orang lain dengan nilai tukar dan tingkat kesulitan yang berbeda. Masing-masing jenis modal ini didapat dan diakumulasikan dengan saling diinvestasikan dalam bentuk-bentuk modal lain.[83] Modal ekonomi, modal dalam arti sempit adalah modal yang secara langsung bisa dikonversi dalam bentuk uang dan bisa diobjektifkan dalam bentuk hak milik. Modal ekonomi merupakan jenis modal yang relatif paling independen. Jika modal lain lebih

[81] Bourdieu, *The Logic of Practice*, 57.
[82] Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, 245.
[83] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terikat pada arena tertentu, modal ekonomi lebih leluasa ditransfer antar arena, juga paling mudah diwariskan pada orang lain.[84]

Modal budaya dapat mewujud dalam tiga bentuk: bentuk menubuh, terobjektifikasi, dan terlembagakan. Dalam kondisi menubuh, modal budaya berupa disposisi tubuh dan pikiran yang dihargai dalam suatu arena tertentu. Dalam bentuk ini, modal budaya diperoleh melalui proses penubuhan dan internalisasi yang butuh waktu agar berbagai disposisi ini menyatu dalam habitus agen. Ia tidak bisa ditransfer pada orang lain begitu saja layaknya modal ekonomi.[85]

Modal sosial adalah kumpulan sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan saling mengenal dan mengakui yang memberi masing-masing anggotanya dukungan modal yang dimiliki bersama. Modal sosial bisa mewujud dalam bentuk praktis atau terlembagakan. Keduanya diproduksi dan direproduksi melalui pertukaran (komunikasi, barang, afeksi, perkawinan, dsb). Dalam bentuk praktis, modal sosial didasarkan pada hubungan yang relatif tidak terikat seperti pertemanan. Sedang dalam bentuk terlembagakan, modal sosial mewujud dalam keanggotaan dalam suatu kelompok yang relatif terikat seperti keluarga, suku, sekolah, partai, atau organisasi.[86]

Jenis modal yang lain adalah modal simbolik. Modal simbolik sebenarnya merupakan modal dari jenis-jenis lain yang disalah-kenali tidak

---

[84] Pierre Bourdieu, "The Form of Capital", terj. Richard Nice, dalam J.G. Richardson, *Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education* (New York: Greenwood Press, 1986), 242.
[85] Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social*, 54.
[86] Pierre Bourdieu, "The Form of Capital", 248-250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai modal yang semena, melainkan dikenali dan diakui sebagai sesuatu yang absah dan natural.[87]

H. Doksa

Doksa adalah seperangkat keyakinan mendasar yang bahkan tidak perlu ditegaskan dalam bentuk dogma eksplisit dan kesadaran diri.[88] Doksa pertama kali digunakan oleh Bourdieu dalam deskripsi dan penjelasannya tentang praktik dan sikap alami dalam masyarakat tradisional dari perspektif fenomenologis. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang alasan praktis dari kelompok orang yang diteliti berdasarkan pada visi dan pengalaman dunia mereka sendiri. Doksa mengacu pada pengetahuan intuitif pra-reflektif yang dibentuk oleh pengalaman ke kencederungan fisik dan relasional yang tidak disadari yang diwariskan. Bagi Bourdieu, pendekatan tersebut lebih merupakan epistemologis daripada pendekatan antropologis tradisional. Karena pendekatan tersebut menjembatani kesenjangan antara proyeksi intelektual yang terlepas dari antropologi struktural dan keterlibatan artifisial etno-metodologis.[89]

Dalam lingkungan sosial, doksa berhubungan dengan "apa yang diterima begitu saja", dengan kenyataan yang dengan suara bulat tidak dipertanyakan karena itu berada di luar gagasan penyelidikan. Hal ini berkaitan dengan keadaan tidak bersalah yang paling dasar dengan apa yang tidak bisa dikatakan karena kurangnya wacana yang tersedia. Kepatuhan yang diungkapkan dalam hubungan

---

[87] Pierre Bourdieu, *In Other*, 134.
[88] Bourdieu, *Pascalian Meditations*, 16.
[89] Cecile Deer, “Doxa” dalam Michael Grenfell, *Pierre Bourdieu Key Concepts* (Durham: Acumen, 2008), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

doksik dengan dunia sosial adalah bentuk absolut dari pengakuan legitimasi melalui kesalahan pengakuan terhadap kesewenang-wenangan, karena ia tidak menyadari pertanyaan legitimasi, yang muncul dari persaingan untuk legitimasi, dan karenanya dari konflik antara kelompok yang mengaku memilikinya.[90]

Menurut Bourdieu, doksa itu berbeda dengan *episteme.* Dalam tradisi idealis objektifitas makna atau rasionalitas dunia adalah didefinisikan oleh persetujuan dari para subjek yang memiliki daya untuk menstruktur.[91] Lanjut Bourdieu memnjelaskan bahwa:

> Doxa is the relationship of immediate adherence that is established in practice between a habitus and the field to which it is attuned, the preverbal taking-for-granted of the world that flows from practical sense. Enacted belief, instilled by the childhood learning that treats the body as a living memory pad, an automaton that leads the mind unconsciously along with it, and as a repository for the most precious values, is the form par excellence of the blind or symbolic thought[92]

Doksa merupakan hubungan kesetiaan (kepercayaan dan penerimaan) langsung terhadap aturan main dalam praktik di antara suatu habitus dan arena. Aturan tersebut membuat dunia diterima begitu saja. Tanpa kepercayaan ini, seorang agen tidak akan melihat adanya nilai dalam arena tertentu, dan ia tidak akan turut serta di dalamnya. Doksa sama dengan *consensus*.

Dengan kata lain, doksa adalah kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar, berakar mendalam, mendasar, yang dipelajari, yang dianggap sebagai universal-universal yang terbukti dengan sendirinya *(self-evident)*, yang menginformasikan tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran seorang agen dalam arena *(field)* tertentu.

---

[90] Bourdieu, *Outlline of A Theory,* 168.
[91] Bourdieu, *Language And Symbolic,* 164.
[92] Bourdie, *The Logic of Practice*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Doksa cenderung mendukung pengaturan sosial tertentu pada arena tersebut, dan dengan demikian mengistimewakan pihak yang dominan dan menganggap posisi dominan tersebut sebagai terbukti dengan sendirinya dan lebih disukai secara universal *(Universally favorable).*[93]

[93] Dwizatmiko, "Kuasa Simbolik Menurut Pierre Bourdieu: Telaah Filosofis" (Skripsi--Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROFIL, SEJARAH DAN GERAKAN GNPF-U

A. Profil GNPF-U

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau dikenal sebagai GNPF-U merupakan gerakan monumental yang telah membentuk kekuatan aliansi baru yang mencakup ulama dan tokoh agama dengan spektrum ideologi yang luas. Gerakan ini menjadi suatu wadah strategis penyatuan umat islam melalui fatwa yang disebut "Ijtima Ulama". Tokoh-tokoh yang berada dalam barisan GNPF-U berhasil membentuk mayoritarisme bernama "Umat Islam". Lebih lanjut GNPF-U juga berhasil membangun kesadaran kolektif agar umat Islam mempunyai pemahaman yang sama sesuai hasil Ijtima Ulama.

Menarik jika melihat sejarah perjalanan dan perubahan GNPF-U, dimulai dari banyaknya pertemuan rutin beberapa tokoh agama dan tokoh dari berbagai Ormas Islam yang mencemaskan kondisi umat Islam di Indonesia hingga kemudian menjadi sebuah organisasi yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) kemudian berganti nama menjadi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U).

B. Sejarah GNPF-U

Setiap gerakan pasti memiliki sejarahnya masing-masing, begitu juga GNPF-U yang juga memiliki sejarah cukup panjang. Seperti yang telah penulis singgung di atas bahwa GNPF-U adalah perubahan nama dari GNPF-MUI yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncul atas aksi yang berasal dari Ahok karena telah melakukan penistaan terhadap agama dan kemudian reaksi dari Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan sikap keagamaan serta tuntutan dan dorongan masyarakat yang begitu besar menuntut hukum yang berkeadilan.[1]

Gerakan tersebut terbentuk pasca Aksi pertama terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Para tokoh-tokoh Islam bersatu membentuk sebuah gerakan yang bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) untuk melakukan aksi demonstrasi membela Alquran dan menuntut Ahok diadili seadil-adilnya. Proses pembentukan GNPF-MUI awalnya hanya dipelopori oleh habib Riziq tokoh dari Front Pembela Islam (FPI) dan Bachtiar Nasir (Pimpinan AQL Islamic Center). Hingga akhirnya GNPF-MUI menjadi wadah bersama berkumpulnya ormas Islam dan elemen lainnya dalam Aksi Bela Islam.[2]

Setelah gerakan ini mampu membetot sentimen agama dengan memobilisasi massa ke Monumen Nasional lewat sejumlah demonstrasi pada panggung pilkada DKI 2017, nama aliansi tersebut tidak lagi menggunakan embel-embel Majelis Ulama Indonesia. Gerakan ini resmi berganti nama menjadi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dan strukturnya sejak

---

[1] Siti Utami Prismamudti "Strategi Komunikasi GNPF-MUI dalam Menggalang Massa Aksi 212" (Skripsi--Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 55.

[2] Abdulloh Fuadi, "Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual", *Jurnal Hanifiya : Jurnal Studi Agama-Agama,* Vol. 1, No. 1 (2018), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oktober 2017.[3] Hal ini karena GNPF tidak mau membebani MUI dengan namanya yang menempel di GNPF.

Keputusan tersebut disampaikan oleh ustdz Bachtiar Nasir selaku ketua umum GNPF-MUI dalam konferensi pers dalam menyikapi perppu Ormas di Hotel Syahid, Jakarta. Alasannya adalah karena GNPF tidak ingin membebani MUI dengan menempelkan namanya di GNPF, sebab MUI tentu mempunyai privasi sendiri dalam mengambil sikap. Lebih lanjut Bachtiar menjelaskan bahwa istilah ulama dalam organisasi GNPF-U merupakan ijma bersama dari tokoh ulama yang tergabung di dalamnya. Mereka sepakat dalam mengambil keputusan mengubah nama tersebut.[4] Meskipun berganti nama, nafas perjuangan GNPF-U tetap terasa sebagai referensi umat dengan turut aktif memberikan tanggapan terkait isu-isu yang ada.

Senada dengan argumentasi yang disampaikan oleh ketua Umum yang baru Yusuf Martak pengganti Bachtiar Nasir, bahwa pergantian nama GNPF-MUI menjadi GNPF-U adalah untuk memperluas misi perjuangan yang tidak hanya berkutat pada pengawalan fatwa MUI, melainkan fatwa ulama secara umum. Soal pergantian ketua, Yusuf menjelaskan hal ini tidak lain hanya untuk menyegarkan dan mengefektifkan manajemen organisasi. Pergantian ini hanya ketua dan sekretaris sedangkan struktur lainnya tetap.[5] Yaitu Yusuf Martak menggantikan

[3] Agenda Politik di Balik GNPF Ulama & Alumni 212, dalam https://tirto.id/. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2019.
[4] GNPF MUI Ganti Nama Menjadi GNPF Ulama, dalam https://www.google.com/amp/s/mrepublika.co.id/amp/oymkdr396. Diakses pada tanggal 20 September 2019.
[5] GNPF MUI Berubah Nama Jadi GNPF Ulama untuk Perjuangkan Misi yang Lebih Luas, dalam https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/03/13.Diakses pada tanggal 20 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bachtiar Nasir sedangkan M. Al Khaththath menggantikan Zaitun Rasmin sebagai sekjen.[6]

C. Struktur GNPF-U

Berikut adalah nama-nama Pengurus GNPF-U

Ketua Dewan Pembina	: Habib Rizieq Shihab
	: Bachtiar Nasir
Ketua	: Yusuf Muhammad Martak
Wakil Ketua	: KH. Muhaimin Zaitun Rasmin
	: KH. Misbahul Anam
Sekretaris	: M. Al- Khaththath
Bendahara	: Muhammad Lutfie Hakim
Panglima Lapangan	: Munarman
Media Center	: Erick Yusuf
Advokasi	: Kapitra Ampera[7]

D. Gerakan GNPF-U

Secara historis GNPF-U muncul sebagai respons untuk membela agama Islam yang menurut mereka sudah dinistakan. Misi suci itu dimanifestasikan

[6]Struktur Pengurus GNPF Ulama Berubah, HRS:Kami Solid, dalam www.dakta.com/news/14260/. Diakses pada 20 September 2019.
[7] Siti Utami Prismamudti, "Strategi Komunikasi GNPF-MUI dalam Manggalang Massa Aksi 212", (Skripsi--Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk praksis gerakan yaitu Aksi Bela Islam. Di bawah pimpinan Yusuf Martak GNPF-U bersentuhan secara langsung dengan persoalan politik yaitu momentum pemilihan presiden tahun 2019. Meskipun motif gerakan yang ditampilkan dalam momentum tersebut tidak ditampilkan secara politis dan demi mempersatukan umat islam, tidak sedikit tokoh yang menganggap tindakan itu bersifat politis. Sebab keterlibatan GNPF-U yang terlalu jauh dalam persiapan kontestasi Pilpres.

Informasi yang diberitakan oleh Tribunnews.com bahwa GNPF-U mulai menyoroti isu-isu utama yang berkembang di tahun politik yang terkait dengan kepentingan umat Islam. Isu tersebut ialah pemilihan presiden (pilpres) 2019 salah satunya melalui hajatan kongres umat Islam pada April 2018 di Jakarta. Di mana dalam kongres tersebut akan dibahas isu seperti memperkuat persatuan umat islam dalam menghadapi tahun politik dan sikap umat islam dalam pilpres agar menghasilkan pimpinan yang membawa kemaslahatan bagi umat.

> Kami akan mengedukasi umat di tahun politik ini terutama terkait perhelatan pilkada 2018 dan pilpres 2019 agar umat memahami dan menentukan calon pemimpin yang layak pilih sesuai rekam jejak yang bersih dan kompetensi." Ujar Yusuf Martak.[8]

Sebagai upaya dalam merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh GNPF-U sesuai hasil pembahasan di kongres, GNPF-U di bawah pimpinan Yusuf Martak mengadakan Ijtima Ulama sebagai bentuk perjuangan yang diharapkan mampu memperkuat barisan umat menuju Indonesia berkah dengan menyatukan partai-partai politik yang berjuang bersama umat. Dalam perjalanannya Ijtima

[8] GNPF MUI Berubah Nama Jadi GNPF Ulama untuk Perjuangkan Misi yang Lebih Luas, dalam https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/03/13. Diakses tanggal 20 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama tidak selesai sekali pertemuan saja melainkan Ijtima ini berlangsung hingga Jilid empat atau Ijtima Ulama IV.

E. Ijtima Ulama

Ijtima Ulama merupakan Forum pengambilan keputusan sikap politik yaitu arah dan dukungan dalam pemilihan Presiden 2019 yang bertujuan demi kesatuan umat Islam. Tidak hanya GNPF-U saja yang terlibat dalam forum Ijtima Ulama tersebut melainkan FPI, dan PA 212.[9] Meski begitu tidak sedikit kalangan yang menganggap Ijtima Ulama sebagai langkah politis. Seperti yang dikatakan oleh peneliti politik Islam LIPI, Wasisto Raharjo Jati, bahwa Ijtima Ulama tidak lebih sebagai politisasi status ulama dan agama. Karena identitas sebenarnya orang-orang yang ada di dalam Ijtima Ulama adalah simpatisan kubu 02, dan mereka bertujuan semata-mata agar jagoannya menang.[10]

1. Ijtima Ulama I

CNNIndonesia.com mengabarkan, Pertemuan pertama para tokoh ulama dan nasional dilaksanakan pada tanggal 27-29 Juli yang kemudian disebut dengan Ijtima Ulama. Ijtima Ulama yang gelar oleh GNPF-U mengundang lima partai politik—Gerindra, PKS, PAN, PBB dan Partai Berkarya—dan menghasilkan sebuah konsensus rekomendasi yaitu mengusulkan ketua partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Salim Segaf al-Jufri atau ustad Abdul Somad sebagai pasangan yang akan mendampingi Prabowo. Rekomendasi dari Ijtima

[9] Yusuf Martak Sebut Ormas Islam di Ijtima Ulama Belum Tertarik Buat Parpol, dalam https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2019/08/05/203334/. Diakses 11 Oktober 2019.
[10] Saat Ijtima Ulama 3 Direspon Negatif NU, Muhammadiyah, Hingga MUI, dalam https://tirto.id/. Diakses 11 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama tersebut terlebih dahulu didiskusi bersama Rizieq Shihab. Seperti yang disampaikan oleh Yusuf Martak bahwa Rizieq Shihab mengarahkan dengan segala pertimbangan dari segala sisi.[11]

Keputusan GNPF-U merekomendasikan kedua kandidat sebagai calon wakil presiden atas pertimbanga latar belakang religius. Sebuah kalkulasi politik yang ingin menjadi reprentasi rakyat dari tokoh nasional dan agama.[12] Sebagaimana diketahui Salim Segaf al-Jufri sedang menjabat ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Abdul Somad adalah tokoh agama khususnnya sebagai pendakwah. Hal ini merupakan politik identitas untuk menggait jumlah massa yang besar. Seperti yang sudah dipraktikkan dalam pilkada tahun 2017. Menurut Rizieq Shihab, umat Islam dan ulam pada Pilkada DKI Jakarta 2017 juga melakukan politik identitas dengan menjunjung tinggi ayat suci Alquran di atas ayat konstitusi. Serta Ijtima Ulama akan terus menghidupkan dan menggelorakan politik identitas kebangsaan atas dasar ketuhanan yang maha esa demi menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila.[13]

2. Ijtima Ulama II

Ijtima Ulama II merupakan kelanjutan dari Ijtima Ulama I setelah Prabowo Subianto tidak mengikuti formulasi pasangan calon yang direkomendasikan oleh GNPF-U. Melainkan dalam perkembangannya Prabowo

---

[11] Ijtima Ulama Rekomendasikan Duet Capres Prabowo-Abdul Somad https://m.cnnindonesia.com/nasional/ 20180729115834-32-31-317830/. Diakses 7 Oktober 2019.
[12] Ijtima Ulama GNPF Rekomendasikan Abdul Somad Cawapres Prabowo Https://nasional.tempo.co/read/ 1111556/. Diakses 9 Oktober 2019.
[13] Rizieq Shihab Serukan Politik Identitas di Ijtima Ulama II, https://m.cnnindonesia.com/nasional/ 20180916152502-32-330602/. Diakses 9 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih memilih wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga salahuddin Uno sebagai pasangan. Formulasi pasangan Prabowo-Salim tidak disepakati dalam internal partai koalisi keumatan- Gerindra, PKS, PAN, sementara Abdul Somad menolak untuk mendampingi sebab ia ingin tetap fokus dalam berdakwah.[14] Ijtima Ulama II berlangsung pada tanggal 16 September 2018 yang bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jakarta. Tujuannya tidak lain adalah untuk menentukan sikap dan arah dukungan para Ulama di Pilpres 2019.[15]

Dalam upaya menindaklanjuti keputusan Prabowo dalam memilih sandiaga Uno, GNPF-U mengadakan pertemuan kedua yang disebut ijtima Ulama II. Ijtima Ulama II, kata Yusuf Martak, bertujuan untuk memastikan peran Ulama dalam dukungan untuk pasangan Prabowo-sandiaga Uno, serta komitmen komitmen keduanya atas hasil Ijtima Ulama. Dalam momen itu juga Yusuf mengatakan bahwa Ijtima Ulama jilid II digelar dengan semangat pergantian Presiden terkait Pilpres 2019. Berikut perkataan Yusuf Martak

> Yang dibahas dalam Ijtima Ulama II ini yakni pasangan yang sudah ditetapkan yaitu Prabowo-Sandi. Ijtima itu diadakan dengan semangat pergantian presiden. Jadi jangan ada yang tanya soal geser dukungan. Tidak ada".[16]

Menurut informasi yang diterima CNNIndonesia.com, Ijtima Ulama II akan dibuka dengan pembacaan tilawah, kemudia dilanjut sambutan dari ketua GNPF-U Yusuf Martak dan doa. Acara dilanjut dengan sidang pleno I yang berisi penjelasan ketua GNPF-U tentang hasil Ijtima Ulama I. Akan dibahas pula

---

[14] Hasil Ijtima Ulama II Pastikan Dukungan Bagi Prabowo-Sandiaga https://www.google.com/ amp/s/www.voaindonesia.com/amp/4571457. Diakses 9 Oktober 2019.

[15] PAN Soal Ijtima Ulama II Dukung Prabowo: Tunggu Saja Hasilnya, https://m.cnnindonesia.com/ nasional/20180916112044-32-330566/.Diakses 9 Oktober 2019.

[16] Undang Prabowo, Ijtima Ulama II Usung Semangat Ganti Presiden, https://m.cnnindonesia.com/nasional /20180913144352-32-329946/. Diakses 10 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persiapan dan input strategi pemenangan serta penjelasan soal pakta integritas. Berlanjut sidang pleno II yaitu mendengarkan arahan dari Rizieq Shihab dari Makkah, kemudia pemaparan dari capres dan cawapres. Acara diakhiri dengan penanda tanganan pakta integritas.[17]

Ada 17 poin dalam pakta integritas pada Ijtima Ulama II. *Pertama,* sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. *Kedua,* siap menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan etika, siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari tantangan faham-faham yang merusak dan bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. *Ketiga,* berpihak kepada kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsional, keadilan, dan kebersamaan. *Keempat,* memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama. *Kelima,* sanggup menjaga dan mengelola *ukhuwah Islamiyah. Keenam,* menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia. *Ketujuh,* menjaga keutuhan NKRI. *Kedelapan,* mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. *Kesembilan,* menjaga TAP MPRS No.25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman Komunisme.

Kesepuluh, menjaga agama-agama yang diakui di Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan dan penistaan. *Kesebelas,* melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakkan hukum secara adil. *Kedua belas,* menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan.

[17] Ijtima Ulama II Digelar tertutup, Prabowo Direncanakan Hadir, https://m.cnnindonesia.com/ nasional/ 2018096103506-32-330564/. Diakses 9 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga belas, menjamin kehidupan warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan. *Keempat belas*, menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional. *Kelima belas*, menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. *Keenam belas*, siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberi keadilan kepada Ulama, aktivis 411, 212 dan 313 yang pernah disangkakan. *Ketujuh belas*, menghormati posisi ulama dan bersdia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.[18] Penandatangan pakta integritas menandakan kesepakatan antara GNPF-U dengan pasangan calon Presiden Prabowo-Sandi, dan akhirnya GNPF-U secara resmi memberikan dukungan penuh terhadap Prabowo-Sandi.

3. Ijtima Ulama III

Berawal dari asumsi adanya kecurangan dalam pilpres 2019, GNPF-U kembali merapatkan barisan yang melibatkan tokoh agama dan tokoh nasional dalam Ijtima Ulama III yang diselenggarakan di Hotel Lorin Sentul, Bogor

[18] Ini Isi 17 Butir Pakta Integritas GNPF yang Diteken Prabowo-Sandiaga, https://nasional.kompas.com/read/2018/09/16/17591881. Diakses 9 oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 1 Mei 2019.[19] Sebagaimana Ijtima Ulama I dan II, Ijtima Ulama III juga melibatkan tokoh politik dan masih dalam pembahasan nuansa politik. Sebenarnya, wacana ini pertama kali dilontarkan oleh ketua umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis dalam video yang beredar di media sosial. Dalam videoa itu Sobri mengatakan bahwa ijtima Ulama III diadakan untuk merespon dugaan kecurangan pada pemilu 2019.[20]

Forum ketiga yang diadakan oleh GNPF-U tersebut berjalan dengan lancar dan damai. Dihasilkan sebuah kesimpulan yang dinyatakan secara eksplisit bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan secara struktur, sistematis dan masif. Meski data, temuan dan bukti terkait kecurangan belum bisa dilaporkan sebagaimana yang diminta oleh salah satu anggota Bawaslu Mochammad Affifuddin di Hotel Brobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ijtima Ulama terus mendesak agar Bawaslu dan KPU segera melaksanakan rekomendasi dari hasil Ijtima III.[21]

Adapun poin-poin yang direkomendasikan dari Ijtima Ulama III ialah sebagai berikut; *Pertama*, menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. *Kedua*, mendorong dan meminta BPN Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural terkait kecuranagan tersebut. *Ketiga*, mendesak KPU dan Bawaslu untuk

[19] Top 3 News: Rekomendasi Ijtima Ulama III untuk Prabowo-Sandi, https://m.liputan6.com/ news/ read/ 3955023/. Diakses 11 Oktober 2019.
[20] Ijtima Ulama III Libatkan Tokoh Politik, Digelar di Jakarta, https://m.cnnindonesia.com/ nasional/ 20190429100257-32-390414/. Diakses 10 Oktober 2019.
[21] Ijtima Ulama III Minta Jokowi Didiskualifikasi, ini Jawaban Bawaslu, https://m.detik.com/ news/ berita/ d4533261/. Diakses 10 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendiskualifikasi pasangan calon capres-cawapres 01. *Keempat,* mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar'i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan, kejahatan dan ketidakadilan termasuk perjuangan pembatalan paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam pilpres 2019. *Kelima,* memutuskan bahwa melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan merupakan amar makruf nahi munkar serta konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.[22]

4. Ijtima Ulama IV

Persoalan yang dipandang perlu dipecahkan berdasarkan kesepakatan para tokoh agama dan nasioal rupanya tidak cukup pada Ijtima Ulama III. Para tokoh inisiator Ijtima Ulama kembali membuat forum lanjutan yang keempat, Ijtima Ulama IV. Forum ini berlangsung di hotel yang sama seperti Ijtima Ulama III, yaitu di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 Agustus 2019. Secara garis besar Ijtima Ulama IV menyatakan menolak kekuasaan yang dilandasi kecurangan dan kedzaliman.[23] Oleh karena itu wajar jika Rizieq Sihab saat membuka Ijtima Ulama IV tersebut mengajak untuk memperkuat konsolidasi ulama dan umat untuk meraih kemenangan melalui jihad konstitusional dengan cara-cara yang elegan, berakhlak serta bermartabat.[24]

---

[22] Ijtima Ulama III Dituding Sesatkan Umat, Begini Kata BPN Prabowo, https://www.google.com/ amp/s/ nasional.temo.co/amp/1201309/. Diakses 10 Oktober 2019.
[23] Ijtima Ulama IV Sikapi Kecurangan Pemilu, Rusuh Mei & Kematian KPPS, https://tirto.id/. Diakses 13 Oktober 2019.
[24] Fakta Menarik Tentang Ijtima Ulama IV, https://news.detik.com/berita/d-4654580/. Diakses 13 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Acara berlangsung selama sembilan jam dan merangkum delapan rekomendasi. Berikut adalah delapan rekomendasi sesuai yang diperoleh dari CNNIndonesia.com, Ijtima Ulama IV.

Putusan Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional IV

"Menimbang dan seterusnya

Mengingat : berpedoman pada ayat-ayat suci Alquran: an-Nisa ayat 58, an-Nisa ayat 135, al-Maidah ayat 8, al-Maidah ayat 42, Hud ayat 113, Ibrahim ayat 42, an-Nahl ayat 90, asy-Syura ayat 227, al-Hujurat ayat 9, serta hadis-hadis Nabi. Beberapa menjadi konsideran memutuskan rekomendasi Ijtima Ulama 4.

1. a) Ijtima Ulama bahwa sesungguhnya semua Ulama ahlussunnah wa al-jamaah telah sepakat penerapan syariah dan penegakan khilafah serta *amar ma'ruf nahī munkar* adalah kewajiban agama Islam

b) Konstitusi NKRI bahwa dalam konstitusi, NKRI telah diamanatkan untuk menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. bahwa pemilu 2019 adalah pemilu curang yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal.

3. kematian lebih dari lima ratus petugas pemilu tanpa autopsi ditambah ada lebih dari sebelas ribu petugas pemilu yang jatuh sakit serta dirawat di berbagai rumah sakit adalah tragedi kemanusiaan yang harus diusut tuntas untuk mengetahui sebab musababnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. bahwa tragedi berdarah 21-22 Mei yang menyebabkan ratusan rakyat terluka, ada yang ditangkap dan disiksa, serta sepuluh orang dibunuh secara sadis dan brutal, empat diantaranya adalah anak-anak, merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diproses tuntas secara hukum demi tegaknya keadilan.

Menetapkan, memutuskan:

1. Menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kedzaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut.

2. Menolak segala putusan hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan.

3. Mengajak seluruh ulama dan umat untuk terus berjuang dan memperjuangkan

3.1. Penegakan hukum terhadap penodaan agama apapun oleh siapapun sesuai amanat undang-undang antipenodaan agama dan tertuang dalam Tap MPRS Nomor 1 tahun 1995 juncto UU Nomor 5 tahun 1999, juncto pasal 156 a.

3.2. Mencegah bangkitnya ideologi marxisme, leninisme, komunisme, maoisme dalam bentuk apapun dan cara apapun. Sesuai amanat Tap MPRS nomor 28 Tahun 196,6 UU Nomor 27 tahun 1999 juncto KUHP pasal 1, 107 a, 107 b, 107 c, 107 d, dan 107 e.

3.3. Menolak segala bentuk perwujudan tatanan ekonomi kapitalisme dan liberalisme di segala bidang, termasuk penjualan aset negara kepada asing maupun aseng. Dan memberikan kesempatan pada semua pribumi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa memandang suku maupun agama untuk menjadi tuan di negeri sendiri.

3.4. Pembentukan tim investigasi dan advokasi untuk mengusut tuntas tragedi 2019 yang terkait kematian lebih dari 500 petugas pemilu tanpa otopsi dan lebih dari sebelas ribu petugas pemilu yang jatuh sakit serta ratusan rakyat yang terluka, ditangkap, dan disiksa bahkan sepuluh orang dibunuh secara keji dan empat di antaranya adalah anak-anak.

3.5 Menghentikan agenda pembubaran ormas Islam serta setop kriminalisasi ulama maupun persekusi dan serta membebaskan semua ulama dan aktivis 212 beserta simpatisan yang ditahan, dipenjara pascaaksi 212 tahun 2016 hingga kini dari segala tuntutan. Serta memulangkan imam besar umat Islam Indonesia Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab ke Indonesia tanpa syarat apapun.

3.6 Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara.

4. Perlunya Ijtimak Ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan Ulama serta tokoh istiqomah untuk terus menjaga kemaslahatan agama bangsa dan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perlunya dibangun kerja sama dari pusat hingga daerah antar ormas Islam dan parpol yang selama ini istiqomah berjuang bersama habaib dan ulama, serta umat Islam dalam membela agama bangsa dan negara.

6. Menyerukan kepada umat Islam untuk mengkonversi simpanan dalam bentuk logam mulia.

7. Membangun sistem kaderisasi yang sistematis dan terencana sebagai upaya melahirkan generasi Islam yang tangguh dan berkualitas.

8. Memberikan perhatian secara khusus terhadap isu dan masalah substansial tentang perempuan anak dan keluarga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan agama dan budaya."[25]

[25] Sebut Khilafah Wajib, Ijtima Ulama IV Usul NKRI Bersyariah, https://m.cnnindonesia.com-nasional/20190805191825-32-418664/. Diakses 11 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KUASA SIMBOLIK IJTIMA ULAMA GNPF-U DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019

A. GNPF-U: Ijtima Ulama sebagai Simbol Projek Hegemonik[1]

Kelompok GNPF-U merupakan wadah yang menaungi dan memfasilitasi aspirasi masyarakat Islam dalam berbagai mode politik. Terlebih upaya ini terlihat jelas pada tahun politik dalam pemilihan presiden 2019. Upaya tersebut diaksentuasi dalam bentuk simbolisasi agama sebagai identitas penyatuan umat. Penamaan kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama sendiri sudah mengandung simbol sebagai proyek hegemonik. Upaya hegemoni ini lebih lanjut dijewantahkan dalam bentuk *symbolic discourse* Ijtima Ulama. Ijtima Ulama merupakan konstruksi lintas kelas yang menyatukan perspektif dalam kata Ulama. Dalam Imagined Community Ben Anderson, yang dikutip oleh Irfan Prayogi, bahwa ada satu trajek yang menyatukan masyarakat dalam *horizon* yang meluas dan mendatar.[2]

Ijtima Ulama yang dilakukan oleh GNPF-U sebagai forum persatuan ulama—meminjam istilah Vadi Hadiz—adalah model populisme Islam yaitu strategi politik dengan menggunakan pendekatan emosional berbasis agama.

---

[1] Laclau dan Mouffe menggambarkan proyek hegemonik itu sebagai model praktik politik, yang menyatukan identitas dan kekuatan politik yang berbeda menjadi proyek atau keinginan bersama, yaitu *social imaginary* atau *myth*, dengan kata lain adalah penciptaan tatanan sosial baru dari satu kelompok elemen tujuan yang berbeda. Lihat, Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno Nasionalisme* (Jakarta: Friederich Ebert Stiftung (FES) dan Acheh Future Institute (AFI), 2010), 25.

[2] Irfan Prayogi, "Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017", (Skripsi--Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2018), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Populisme ini terjadi sebagai bentuk akumulasi habitus dan kekecewaan masyarakat terhadap Negara yaitu rezim Jokowi dan kemudian dilanjut dengan kekecewaan atas proses pemilihan presiden yang dianggap curang secara terstruktur, sistematis dan masif. Populisme terlihat sebagai kepiawaian menggunakan demagogi dan retorika karena inti dari komunikasi adalah membidik pengaruh melalui manipulasi. Umat Islam yang dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada demagog dengan "janji surga" yang terus digelorakan atas nama ulama yang notabene sebagai representasi umat, tanpa sadar menyerap ilusi yang bekerja melalui pencocokan pola tak sadar. Dengan kata lain opini publik ditentukan oleh kesan pertama dan tanpa berpikir panjang pada apa yang menjadi keyakinannya.[3]

Vedi Hadiz menjelaskan bahwa dalam populisme Islam, gerakan/aliansi yang terbentuk terdiri dari berbagai macam kelas yang asimetris dan massa yang terhimpun di dalamnya beragam. Perbedaan antarkelas ini dalam populisme Islam akan hilang disatukan oleh sebuah simbol bersama keagamaan tertentu yang lebih disepakati. Populisme Islam sangat berkaitan dengan pemanfaatan mobilisasi massa dan menggunakan agama sebagai pembentuk identitas politik bersama.[4] Berjuang untuk mengejar aspirasi mereka untuk membangun sejenis masyarakat ideal yang dipandu oleh nilai-nilai Syariah Islam. Dalam fenomena Ijtima Ulama yang dilakukan GNPF-U, meskipun setiap individu memiliki karakteristik yang beragam, mereka merupakan bagian dari umat Islam sebagai representasi dari

[3] Ibid,.17
[4] Vedi Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and The Middle East* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

people yang bergerak melawan rezim yang dianggap dhalim. Bersatu dalam naungan simbol agamis Ijtima Ulama. Dengan kata lain, Ijtima Ulama merupakan terminologi yang diperlukan untuk memobilisasi basis massa.

Menurut Laclau, untuk memahami populisme penting untuk melihat konstruksi suatu penandaan popular yang universal, di mana *chain of equivalence* semakin meluas, kelemahannya akan ada pada hubungannya dengan pertikularitas berbagai tuntutan. Ini yang menurut Laclau berujung pada suatu kesimpulan yang amat krusial dalam analisisnya, *the constuction of a popular subjectivity is possible only on the basis of discursively producting tendencially empty signifiers.*[5]

Sebagai strategi politik, populisme selalu mewacanakan pemisahan antara kelompok "kami" dan "mereka". "Kami" mewakili kelompok yang lebih besar dalam populasi. Identitas tentang siapa "kami" dan siapa "mereka" dibangun melalui politik bahasa dan sentimen agama. populisme sebagai praktik politik dalam memobilisasi massa mampu menciptakan pasangan calon Joko widodo-Makruf Amin sebagai musuh bersama dan membantu fenomena Ijtima Ulama mendapatkan panggung. selain itu populisme memiliki hubungan yang erat dengan kepentingan politik seseorang atau kelompok. Akhirnya, gerakan populisme Islam harus mengklaim dirinya sebagai perwakilan Islam dan Muslim untuk dapat membangun solidaritas berdasarkan simbol-simbol agama. Dan

[5] Irfan Prayogi, "Populisme Islam", 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam fenomena Ijtima Ulama, GNPF-U menggunakan sentimen berbasis agama dalam menyatukan solidaritas massa.[6]

Laclau dan Mouffe melihat bahwa hegemoni akan muncul dalam situasi antagonisme yang memungkinkan pembentukan *frountier politic*. *Frountier politic* ini akan menciptakan pertempuran hegemonik, di mana dalam situasi ini akan membangun apa yang disebut *chain of equevalence* (jalinan kesetaraan) di antara kelompok sosial yang akan melakukan perlawanan terhadap rezim opresif atau liyan *(the other)*. Munculnya batas (*frountier)* yang memisahkan ”kami” dari “mereka” adalah kondisi terbaik untuk menuntut universalisasi berbagai persamaan. Antagonisme memainkan peran penting dalam pembentukan identitas dan hegemoni, karena penciptaan antagonisme sosial meliputi penciptaan musuh yang menjadi penting bagi pembentukan perbatasan politik dikotomis. Medan kemunculan hegemoni adalah bidang untuk praktik artikulasi, dengan kata lain ini adalah bidang di mana elemen tidak dapat mengkristal menjadi momen. Dalam sistem identitas relasional yang tertutup, yang di dalamnya makna setiap momen telah benar-benar disepakati secara absolut, tidak ada ruang sama sekali untuk praktik hegemonik.[7]

Lebih lanjut, Laclau dan Mouffe menjelaskan bahwa artikulasi harus dijalankan melalui suatu konfrontasi dengan praktik-praktik artikulatoris antagonistik. Sehingga praktik akan muncul dalam suatu medan yang penuhi

---

[6] Dian Dwi Jayanto, “Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dan Nahdlatul Ulama (NU)”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 29, No. 1 (2019), 10

[7] Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemoni dan Gerakan Sosialis: Pos-Marxisme dan Gerakan Sosial Baru* (Yogyakarta: Resist Book, 2008), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan antagonistisme-antagonisme dan karena itu mengandaikan adanya fenomena *equivalence* dan efek-efek garis perbatasan.[8]

Antagonisme sosial membuat setiap makna sosial berkontestasi, dan tidak akan pernah penuh. Menurut Laclau Mouffe, dalam hal identitas kolektif, akan selalu menghadapi ciptaan "kami" yang hanya bisa ada jika ada demarkasi dari "mereka". Menurut Mouffe, hubungan "kami" / "mereka" menjadi kawan / lawan dapat terjadi ketika "mereka" menjadi ancaman bagi keberadaan dari "kami". Dalam wacana moral, hubungan "kita" atau "mereka" dibangun untuk menjadi "baik" dan "jahat". Dari pandangan ini, Laclau dan Mouffe memperkenalkan logika perbedaan untuk dijelaskan perluasan tatanan wacana dengan melepaskan rantai kebersamaan yang ada dan untuk menyatukan elemen yang tidak diartikulasikan ke dalam perluasan bentuk.[9]

B. Kuasa Simbolik Ijtima Ulama GNPF-U dalam Pemilihan Presiden 2019

Ijtima Ulama sebagai fatwa politik dalam pemilihan presiden 2019 memiliki pengaruh yang relatif besar. Pasalnya Ijtima Ulama yang digagas oleh GNPF-U membentuk imajinasi sebagai representasi mayoritas umat Islam. GNPF-Ulama menekankan bahwa aspirasi mereka adalah representasi dari Islam dan umat Islam di Indonesia. Narasi *diskursus* yang kerap terbentuk adalah membingkai sumber daya populisme dengan kesatuan identitas sesama umat Islam.[10]

---

[8] Ibid., 204
[9] Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro*, 22.
[10] Dian Dwi Jayanto, "Mempertimbangkan Fenomena", 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis menangkap dari analisis Ijtima Ulama I sampai ijtima IV bahwa terdapat *grand desain* tujuan yaitu "menguatkan dukungan terhadap pasangan calon presiden nomor urut 02". Hal ini secara terus menerus didakwahkan melalui forum-forum ulama. Dengan demikian, ada kandungan lain yang tersirat yaitu bentuk antagonisme menolak pasangan calon presiden nomor urut 01 yang sebetulnya ada secara tertulis dalam salah satu hasil Ijtima Ulama. Dalam pandangan Bourdieu, Ijtima Ulama menjadi doksa yaitu hubungan kesetiaan (kepercayaan dan penerimaan) langsung terhadap aturan main dalam praktik di antara suatu habitus dan arena.[11] Aturan tersebut membuat dunia diterima begitu saja. Bourdieu juga menyebutnya sebagai *illusio* yaitu kepercayaan yang sebenarnya tidak memiliki landasan natural.[12]

Dalam upaya menciptakan kesadaran kolektif tidak hanya melalui dengan penyandangan kata "ulama" dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Melainkan dalam susunan agenda yang bernuansa gerakan populisme Islam[13], seperti pembentukan Ijtima Ulama dan fatwa sebagai hasilnya. Ijtima Ulama merupakan sebuah wacana stimulus yang memiliki kekuatan menciptakan respon. Sebetulnya, Ijtima Ulama merupakan aksentuasi dari "bahasa" yang dalam poin-poinnya mengandung seruan untuk mendukung ulama, yang mana ulama tersebut berafiliasi kepada salah satu pasangan calon. Praktik bahasa ini tidak disadari sebagai sebentuk kuasa atau dominasi. Menurut Bourdieu hal

[11] Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice*, terj. Richard Nise (Standford: Stanford University Press, 1990), 68.
[12] Jen Webb dkk, *Understanding Bourdieu* (Allen&Unwin: Autralia, 2002), 27.
[13] Populisme Islam Sangat Berkaitan Erat dengan Pemanfaatan Mobilisasi Massa dengan Menggunakan Agama Sebagai Simbol Pembentuk Identitas Politik Bersama. Hurriyah, "Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017" *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 1 (2018), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah praktik kuasa simbolik yang mampu menentukan cara memahami realitas dan menciptakan realitas itu sendiri.[14] Dalam pandangan Bourdieu, tindakan afirmatif tanpa proses *critical thinking* tersebut dinamakan kuasa simbolik atau kekerasan simbolik.

Tindakan afirmatif tidak muncul semata-mata tanpa sebab. Dalam hal ini Bourdieu menjelaskan bagaimana proses ini bisa berjalan dengan mulus? Tindakan afirmatif tersebut melalui proses tahapan yang panjang untuk mengakumulasi elemen-elemen yang menjadi syarat utama. Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan ialah, habitus, modal dan arena. Mengkaji Ijtima Ulama yang digagas oleh GNPF-U menggunakan perspektif Bourdieu ditemukan elemen-elemen yang ditawarkan oleh Bourdieu tersebut. Bahwa dalam perjalanannya Ijtima Ulama memiliki habitus yang diakui oleh umat sebagai ulama, modal budaya dan modal simbolik sebagai legitimasi tindakan dan arena sebagai medan pertempuran.

C. Habitus GNPF-U dalam Gagasan Ijtima Ulama

Sebagai organisasi yang tumbuh dari emberio gerakan pembelaan terhadap penistaan agama, orientasi gerakan GNPF-U masih bermuara agamis. Hal tersebut sudah menjadi karakteristik dari gerakan GNPF-U, terpola dan terstruktur karena sudah bertahan lama mulai sejak awal pembentukan. Sehingga tindakan dan gagasan yang menjadi ide besar secara tidak dipaksakan akan berorientasi pada tujuan awal (*culture of orientation).* Sejarah kultur

[14] Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power,* Gino Raymond and Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

religius—pemikiran islamis yang fundamentalis—GNPF-U menjadi konteks yang mengelilinginya. Konteks tersebut merupakan sebuah pengalaman yang dalam durasi lama terstruktur menjadi sebuah habitus melalui proses internalisasi. Melalui habitus ini GNPF-U menghasilkan praktik dan persepsi yang pada gilirannya membentuk dunia sosial.

Persepsi dan pola pikir yang dihasilkan melalui proses dialektika antara internalisasi-ekternalitas dengan eksternalisasi-internalitas berupa habitus bisa dikonvensikan menjadi sebuah organisasi bersama. Komunitas GNPF-U merupakan jenis habitus yang dilembagakan, sebab komunitas ini terbentuk atas dasar persepsi, pola pikir, dan arah gerakan yang sama, sehingga mereka memiliki disposisi dalam merespon dunia sosial sebagai hasil dari internalisasi budaya, konteks dan pemikirannya sama dalam masing-masing individu. Karena habitus adalah produk sejarah yang menghasilkan praktik individual dan kolektif. Habitus ini beroperasi dalam ranah tertentu yang cenderung membuat agen percaya begitu saja pada aturan-aturan yang inheren di dalamnya dan menerimanya sebagai terberi dan alamiah. Juga harus dikatakan kembali, proses tersebut melalui internalisasi struktur dunia sosial yang dihidupi bersama, habitus bersifat kolektif, maka sifat semena tatanan sosial pembentuknya akan dikenali secara kolektif sebagai terberi dan alamiah. Sifat ksesemenanya disalah-kenali secara kolektif dan dengan demikian salah pengenalan mendapatkan sifat objektifnya dengan mengatasi representasi individual.[15]

[15] Pierre Bourdieu, *Pascalian Meditations*, terj. Richard Nice (Standford: Standford University Press, 2000), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

GNPF-U menghasilkan praktik berupa Ijtima Ulama yang menyeru agar umat Islam memilih pasangan calon presiden yang mereka rekomendasikan. Konsensus yang dihasilkan dalam forum tersebut berhasil mengambil banyak perhatian umat Islam. Hal tersebut diprediksi karena sejarah kultur yang berlaku dalam GNPF-U bersifat agamis. Dalam pandangan Bourdieu sejarah kultur menghasilkan disposisi-disposisi yang mempengaruhi kecenderungan tindakan yang disebut habitus. Disposisi-disposisi tersebut mengizinkan agen dalam merespon sebuah konteks. Ia serentak menghassilkan dan merespon praktik.[16] Menurut Lipuma, teori Bourdieu dibangun di atas sebuah konsep kesemenaan budaya/kultur yang merupakan perluasan dari prinsip kesemenaan Saussurean.[17] Kesemenaan budaya dapat dilihat dalam pandangan Bourdieu mengenai bentuk-bentuk simbolik dan bagaimana pengenalan terjadi dalam dunia sosial. Dalam pandangan Bourdieu, sudah sejak Kant disadari bahwa manusia tidak lagi berhadapan dengan dunia objektif yang murni. Pengetahuan tentang objek selalu menyertakan kategori-kategori dalam rasio subjek. Dan dengan demikian, objek dibentuk oleh subjek.[18]

Produk yang dihasilkan dari respon terhadap konteks tersebut adalah Ijtima Ulama. Fatwa hasil ijtima tersebut dijadikan sebuah tanggapan dalam melihat situasi perpolitikan level nasional pada pemilihan presiden tahun 2019. Seperti yang penulis sudah terangkan di atas, ijtima seharusnya merupakan

---

[16] Omar Lizardo, "The Cognitive Origins of Bourdieu's Habitus", *Jurnal for the Theory of Social Behaviour*,Vol. 4, No. 4 (2004), 34.
[17] Edward Lipuma," Culture and the Concept of Culture in a Theory of Practice" , dalam Coulhoun dkk, *Bourdieu: Critical Perspectives* (Cambridge: Polity Press, 1993), 17.
[18] Bourdieu, *Pascalian Meditations*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsensus hasil ijtihad para ulama yang sudah memenuhi syarat dan bebas dari tekanan politis.[19] Kemudian dari ijtihad menghasilkan produk hukum yang berupa fatwa. Dalam catatan sejarah, ijtihad hanya membahas persoalan keagamaan seperti fiqih. Berbeda dengan fatwa yang dilakukan oleh GNPF-U yang sifatnya politis. Justifikasi "politis" ini berdasarkan analisis data yang sudah penulis paparkan di bab iii mengenai profil GNPF-U dan isi dari Ijtima Ulama itu sendiri. Bahwa agen-agen yang tergolong dalam tubuh GNPF-U tidak bebas nilai politis meski tidak secara keseluruhan, serta poin-poin dari hasil Ijtima Ulama I sampai Ijtima Ulama IV mengandung fatwa politis.

Sesuai data yang diperoleh penulis dan sudah dipaparkan dalam bab iii bahwa poin-poin yang terkandung dalam Ijtima Ulama kesatu sampai keempat bersifat politis. Tidak seperti Ijtima Ulama yang dahulu biasa dilakukan oleh kaum *fuqahā* yaitu membahas persoalan keagamaan murni seperti halnya ilmu fiqih. Ijtima Ulama yang dilakukan GNPF-U justru masuk ke dalam ranah politik. Dalam Ijtima Ulama pertama, merekomendasikan kandidat calon presiden. Dalam pertemuan selanjutnya, Ijtima Ulama kedua menghasilkan dukungan penuh terhadap pasangan prabowo-sandi dengan menandatangani pakta integritas. Ijtima Ulama ketiga, GNPF-U mendorong BPN Prabowo untuk mendesak Bawaslu agar mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Makruf Amin. Pertemuan keempat, menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kedzaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut, serta mengajak seluruh ulama dan umat untuk mewujudkan NKRI bersyariah.

[19] Rohadi Abdul fatah, *Analisis Fatwa*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Habitus yang sudah bertahan lama tersebut kemudian menstruktur GNPF-U sebagai kelompok yang konsisten dalam aroma agama. Berawal dari gerakan pembela Alquran yang diduga telah dinistakan oleh Basuki Tjahya Purnama, Aksi Bela Islam dan kemudian Ijtima Ulama. Sejarah kultur yang tertanam ini mendapatkan legitimasi dalam perjuangan atas nama umat Islam. Sehingga aspek politik pragmatis dari agen-agen yang mempunyai kepentingan menjadi kabur bahkan tidak terlihat.

D. Arena GNPF-U dalam Ijtima Ulama

Arena adalah jaringan atau konfigurasi, relasi-relasi objektif antara posisi-posisi yang didefinisikan secara objektif.[20] Pada Tahun politik pemilihan presiden 2019 GNPF-U mendapat posisi objektif yang didefinisikan. Tahun ini menjadi arena pertempuran GNPF-U untuk menancapkan kuasa dominasi. Arena merupakan medan kontestasi dalam memperebutkan afirmasi dan tempat bersaing dalam menentukan prinsip penyusunan hierarki ranah-ranah.[21] Usaha perebutan ini tidak lain bertujuan untuk memaksakan mode produksi dan reproduksi struktur dari habitus GNPF-U terhadap masyarat. Karena strategi dalam perebutan dominasi dalam ranah sangat dipengaruhi oleh posisi yang dimiliki suatu agen atau kelompok, Maka dalam hal ini GNPF-U mempunyai strategi sendiri. Strategi ini dijalankan dengan mengadakan forum ulama yang disebut Ijtima Ulama. Tentu sasaran dari startegi ini bukan masyarakat Indonesia secara kesluruhan melainkan umat Islam yang ada di Indonesia..

---

[20] Richard Jenkins, *Pierre Bourdieu* (London: Routledge, 1992), 85.
[21] Calhoun, "Pierre Bourdieu" dalam Goerge Ritzer, *Blackwell Companion to the Major Social Theoritists* (Cambridge: Blackwell, 2000), 721.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang sudah disinggung penulis di atas bahwa agen-agen yang terhimpun dalam GNPF-U hampir semua berlatar belakang politisi. Latar belakang ini menjadi konteks pembentukan habitus, seterusnya habitus mengarahkan tindakan yang dalam hal ini sikap politis dalam arena percaturan politik level nasional.

E. Modal GNPF-U dalam Ijtima Ulama

Upaya memperoleh dominasi dalam arena, GNPF-U memanfaatkan modal yang dikuasai. Modal yang dominan dimiliki oleh GNPF-U berupa modal simbolik dan modal budaya. Kedua modal ini dapat menentukan posisi agen dalam ranah dan juga kekuasaan yang dimilikinya.[22] Modal simbolik yaitu penyandangan kata "ulama" dalam nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan Ijtima Ulama simbolis yang dilaksanakan untuk mempengaruhi masyarakat. GNPF-U mencoba melempar fatwa politis melalui forum Ijtima Ulama dengan menyentuh ruang kesadaran paling jauh dalam diri manusia, sebagai itikad untuk kesejahteraan Indonesia agar tidak salah memilih pemimpin. Bourdieu menyebut ini sebagai doksa yaitu kesetiaan terhadap aturan main dalam praktik.[23]

Ijtima Ulama mendapatkan legitimasi dari modal budaya yang dimiliki oleh GNPF-U sebagai kelompok agamis. Modal ini seolah menjelaskan bahwa GNPF-U mempunyai otoritas dalam berbicara suatu hal yang bersifat agamis. Sebagai kelompok yang dalam sejarah berdirinya selalu meneriakkan nilai-nilai

[22] Bourdieu, *Language and Symbolic*, 245.
[23] Bourdieu, *The Logic of Practice*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepedulian terhadap agama, tentu pada praktik Ijtima Ulama GNPF-U mendapat banyak simpatisan. Meski, jika dilihat secara kritis sebenarnya agen-agen yang ada dalam tubuh GNPF-U memiliki habitus dalam politik praktis yang kemudian terhimpun dalam wadah yang bernuansa agama. Sehingga misi politik yang dijalankannya seakan menjadi hal yang sudah saharusnya dan dianggap wajar. Respon tersebut selain dipengaruhi habitus juga kinerja modal simbolik dan budaya yang melegitimasi. Habitus berfungsi sebagai skema yang menghasilkan praktik dan representasi ranah-ranah yang berbeda.[24]

Modal budaya yang memperkuat legitimasi sebagai representasi ulama adalah penampilan, meliputi baju warna putih, kopyah, serban, dan jubah. Pakaian tersebut merupakan budaya yang bersifat semena dan dapat disalah-kenali. Modal budaya tersebut seolah menjadi identitas ulama dan kaum soleh. Menggunakan pakaian khasnya GNPF-U meneriakkan *amar ma'ruf nahī munkar* sebagai gerakan politik. Meskipun konsep ini dalam praktiknya di lapangan banyak dipertentangkan oleh sebagian besar masyarakat.

[24] Pierre Bourdieu. *In Other Words,* terj. Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1990), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan data disertai analisis, maka dapat penulis simpulkan terkait dengan topik Ijtima Ulama Simbolis Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Pada Pemilihan Presiden Tahu 2019, sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan data-data yang penulis kumpulkan, dapat diambil kesimpulan bawa GNPF-U memiliki arah gerakan politis dan peran yang relatif besar pada pemilihan presiden tahu 2019. Strategi dalam upaya tersebut terlihat dalam Ijtima Ulama yang menjadi forum pengeluaran fatwa politis.

Kedua, Berdasarkan pendekatan teori Kuasa Simbolik Bourdieu, dapat disimpulkan bahwa dalam fenomena Ijtima Ulama terdapat elemen-elemen kunci yang mendukung terjadinya praktik kuasa simbolik. Hal ini berupa habitus, yaitu pemahaman (keagmaan) yang sudah bertahan lama yang tergolong fundamentalis dan komunitas GNPF-U juga merupakan habitus yang dilembagakan. Arena, medan yang menjadi ruang pertempuran ialah tahun politik dalam pemilihan presiden 2019. Modal, meliputi modal budaya yaitu agen-agen dalam komunitas ini selalu menggunakan jubah, serban, dan pakaian yang mencirikan khas ulama. Modal simbolik, yaitu penyandangan kata “ulama” dalam nama GNPF-U, serta forum Ijtima Ulama yang diselenggarakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan pendekatan kuasa simbolik Pierre Bourdieu. Dengan demikian penelitian ini hanya menjelaskan praktik kuasa simbolik dalam Ijtima Ulama GNPF-U. Penulis sadar terdapat berbagai pemaparan serta hasil kajian belum mencapai kesempurnaan. Untuk itu, penulis berharap akan ada penelitian lebih lanjut dan banyak yang menaruh perhatian terhadap fenomena praktik kuasa simbolik yang terjadi khsusnya di Indonesia, dan mengkaji dengan lebih komprehensif dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya analisis.

1. Saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah agar dapat melakukan penelitian terhadap praktik kuasa simbolik dengan kajian yang lebih mendalam.
2. Dalam bidang akademik, agar pihak akademik dapat memperdalam lagi untuk kajian kuasa simbolik dengan tujuan dapat untuk mempertajam kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan mengungkap gejala atau fenomena yang terkait dengan praktik kuasa simbolik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul, Fatah Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsa, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.

Budiman, K, *Semiotika Visual (Konsep Isu dan Problem Ikonisitas.* Yogyakarta: Jalasutra, 2011.

Bourdieu, Pierre, *Pascalian Meditations*, terj. Richard Nice. Standford: Standford University Press, 2000.

_____,*The Field of Cultural Production,* terj. Randal Johnson. Columbia: Columbia University Press, 1993.

_____, *Sociology in Question,* terj. Richard Nice. London: Sage Publications, 1993.

_____, *In Other Word : Essays Toward a Reflexive Sociology,* terj. Mattew Adamson. California: Standford University Press, 1990.

_____, "The Form of Capital", terj. Richard Nice, dalam J.G. Richardson, *Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education.* New York: Greenwood Press, 1986.

_____, *The Logic of Practice,* terj. Richard Nice. Stanford: Stanford University Press, 1990.

_____, *Outline of A Theory of Practice,* tej. Richard Nice. Cambridge: University Press, 1977.

_____, *In Other Words,* terj. Matthew Adamson. Cambridge: Polity Press, 1990.

_____, *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste,* terj. Richard Nice. Cambridge: Hardvard University Press, 1979.

_____, *Language and Symbolic Power,* terj. Gino Raymond and Matthew Adamson. Cambridge: Polity Press, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bourdieu, Pierre and Wacquant, *An Invintation to Reflexive Sosiology*. Cambridge: Polity Press, 1992.

Calhoun, Craig, "Pierre Bourdieu" dalam Goerge Ritzer, *Blackwell Companion to the Major Social Theoritists*, Cambridge: Blackwell, 2000.

Deer, Cecile, "Doxa" dalam Michael Grenfell, *Pierre Bourdieu Key Concepts*. Durham: Acumen, 2008.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Eco, Umberto, *Teori Semiotika Signifikasi, Teori kode, serta Teori Produksi Tanda.* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2015.

Fashri, Fauzi, *Pierre Bourdieu Menyingkap Kuasa Simbol.* Yogyakarta: Jalasutra, 2014.

Fedyani, Saifuddin Ahmad, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma.* Jakarta: Kencana, 2006.

Gora, Radita, *Hermeneutika Komunikasi.* Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Lipuma, Edward," Culture and the Concept of Culture in a Theory of Practice", dalam Coulhoun dkk, *Bourdieu: Critical Perspectives* Cambridge: Polity Press, 1993.

Hadiz, Vedi, *Islamic Populism in Indonesia and The Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Hardiman, Budi, *Filsafat Modern, Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Harker, Richard dkk, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu, Terj. Pipit Maizier. Yogyakarta: Jalasutra, 2005.

Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Jenkins, Richard, *Pierre Bourdieu*, London: Routledge, 1992.

Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe, Hegemoni dan Gerakan Sosialis: Pos-Marxisme dan Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar, Cheleen, "Pierre Bourdieu: Proyek Intelektual", dalam Richard Harker, *Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu.* Yogyakarta: Jalasutra, 2005.

Martono, Nanang, *Kuasa Simbolik di Sekolah ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Maton, Karl "Habitus", dalam Michael Grenfell, *Pierre Bourdieu Key Consepts.* Durham: Acumen, 2008.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006.

Postone, Moishe, "Introduction: Bourdieu and Social Theory", dalam Craig Calhoun dkk, *Bourdieu Critical Perspective*. Cambridge: Polity Press, 1993.

Potingku, Arry, *Metodologi Penelitian Kualitatif Saja*. Jakarta: Nulisbuku.com, 2016.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*, terj. Alimandan. Yogyakarta: Kencana, 2008.

Sudjiman, Panuti, dkk, *Serba-Serbi Semiotika.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian.* Jakarta: Rajawali, 1987.

Taufan, Damanik Taufik, *Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno Nasionalisme.* Jakarta: Friederich Ebert Stiftung (FES) dan Acheh Future Institute (AFI), 2010.

Thomson, Patricia, "Field", dalam Michael Grenfell, Pierre, *Bourdieu : Key Concepts*. Durham: Acumen, 2008.

Thompson, editor's introduction dalam Bourdieu *Outline of A Theory of Practice*. Cambrigde: Cambridge University Press, 1995.

Warson, Munawwir Ahmad, *al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

W.Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Webb, Jen dkk, *Understanding Bourdieu.* London: Allen & Unwin, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal

Caero, Alexandre, "The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of *Ifta* : A Diachronic Study of Four *Adab al-fatwa* Manuals". *The Muslim Word*, Vol. 96, 2006.

Dwi, Jayanto Dian, "Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dan Nahdlatul Ulama (NU)", *Jurnal Filsafat*, Vol. 29, No. 1, 2019.

Fateh, Mohammad, "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2, 2018.

Fuadi, Abdulloh, "Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual", *Jurnal Hanifiya* :*Jurnal Studi Agma-Agama*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Hurriyah, "Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017" *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Lizardo, Omar, "The Cognitive Origins of Bourdieu's Habitus", *Jurnal for the Theory of Social Behaviour*,Vol. 4, No. 4, 2004.

Lintang, Pradipta A., dkk, "Analisis Bingkai Pemberitaan Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (Aksi 212) di Media Massa BBC (Indonesia) & Republika". *Informasi: Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol. 48, No. 1, 2018.

Nanang, Martono, "Dominasi Kekuatan dalam Pendidikan: Tesis Bourdieu dan Foucault tentang Pendidikan", *Jurnal Interaksi*, Vol. 8, No. 1, 2014.

Umbar, Kisno, "Kajian Semiotika C.S Pierce Dalam Kesenian Bantengan (Upaya Revitalisasi Nilai-Nilai Kesenian Daerah Malang)". Disajikan dalam Konferensi Internasional Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah Indonesia, Oktober, 2015.

Wasith, Albar Muhammad, "Analisis Semiotik Charles Sander Pierce Tentang Taktik Kehidupan Manusia: Dua Karya Kontemporer Putu Sutawijaya". *Lensa Budaya*, Vol.13, No.2, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi

Aunullah, Indi, “Bahasa dan Kuasa Simbolik dalam Pandangan Pierre Bourdieu”. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2006).

Dwizatmiko, "Kekuatan Simbolik Menurut Pierre Bourdieu: Telaah Filosofis", Skripsi tidak diterbitkan (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010).

Elrafiq, Harahap R, “Pemikiran Ustadz Bachtiar Nasir Tentang Pemikiran Kafir (Telaah Terhadap GNPF-MUI dan Aksi Damai 212 di Jakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan (Medan: Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

Prayogi, Irfan, “Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017”, Skripsi tidak diterbitkan (Medan: Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2018).

Pratama, Vera Setia, “Kajian Makna Simbolik Tari Lawet di Kabupaten Kebumen”, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: Jurusan Seni Drama Tari dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2016).

Utami, Prismamudti Siti “Strategi Komunikasi GNPF-MUI dalam Menggalang Massa Aksi 212”, Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

Website

Lapindo bersikukuh Menolak Ganti Rugi Perumahan TAS dalam https://m.detik.com/berita/d/742 637/. Diakses 10 Juni 2019.

Ijtima Ulama III Libatkan Tokoh Politik, Digelar di Jakarta, https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190429100257-32-390414/. Diakses 10 Juni 2019.

Ijtima’ Ulama Rekomendasikan Duet Capres Prabowo-Abdul Somad dalam http://m.cnnindonesia.com/nasional/20180729115834-32-317830. Diakses l 9 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijtima' Ulama III dan Misi Prabowo yang Belum Selesai" dalam http://m.cnnindonesia.com/nasional/20190430205429-32-390986. Diakses l 9 Mei 2019.

Ijtima' Ulama Jilid III Hasilkan 5 Keputusan, TKN 01 Bilang Terserah Aja dalam https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/nasional/politik/0105 /2019. Diakses 22 Mei 2019.

Agenda Politik di Balik GNPF Ulama & Alumni 212, dalam https://tirto.id/. Diakses 8 Agustus 2019.

GNPF MUI Ganti Nama Menjadi GNPF Ulama, dalam https://www.google.com/amp/s/mrepublika.co.id/amp/oymkdr396. Diakses 20 September 2019.

Struktur Pengurus GNPF Ulama Berubah, HRS: Kami Solid, dalam www.dakta.com/news/14260/. Diakses 20 September 2019.

Yusuf Martak Sebut Ormas Islam di Ijtima Ulama Belum Tertarik Buat Parpol.dalamhttps://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2019/ 08/05/203334/. Diakses 11 Oktober 2019.

Saat Ijtima Ulama 3 Direspon Negatif NU, Muhammadiyah, Hingga MUI, dalam https://tirto.id/. Diakses 11 Oktober 2019.

Ijtima Ulama Rekomendasikan Duet Capres Prabowo-Abdul Somad https://m.cnnindon esia.com/nasional/ 20180729115834-32-31-317830/. Diakses 7 Oktober 2019.

Ijtima Ulama GNPF Rekomendasikan Abdul Somad Cawapres Prabowo https://nasional. tempo.co/read/ 1111556/. Diakses 9 Oktober 2019.

Rizieq Shihab Serukan Politik Identitas di Ijtima Ulama II, https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180916152502-32-330602/. Diakses 9 Oktober 2019.

Hasil Ijtima Ulama II Pastikan Dukungan Bagi Prabowo-Sandiaga https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/4571457. Diakses 9 Oktober 2019.

PAN Soal Ijtima Ulama II Dukung Prabowo: Tunggu Saja Hasilnya, https://m.cnnindon-esia.com/nasional/20180916112044-32-330566/ diakses 9 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Prabowo, Ijtima Ulama II Usung Semangat Ganti Presiden, https://m.cnnindone-sia.com/nasional/20180913144352-32-329946/. Diakses 10 Oktober 2019.

Ijtima Ulama II Digelar tertutup, Prabowo Direncanakan Hadir, https://m.cnnindonesia.com/ nasional/ 2018096103506-32-330564/. Diakses 9 Oktober 2019.

Ini Isi 17 Butir Pakta Integritas GNPF yang Diteken Prabowo-Sandiaga, https://nasional.kom-pas.com/read/2018/09/16/17591881. Diakses 9 Oktober 2019.

Top 3 News: Rekomendasi Ijtima Ulama III untuk Prabowo-Sandi, https://m.liputan6.com/ news/ read/ 3955023/. Diakses 11 Oktober 2019.

Ijtima Ulama III Libatkan Tokoh Politik, Digelar di Jakarta, https://m.cnnindonesia.com/ nasional/ 20190429100257-32-390414/. Diakses 10 Oktober 2019.

Ijtima Ulama III Minta Jokowi Didiskualifikasi, ini Jawaban Bawaslu, https://m.detik.com/ news/ berita/ d4533261/.Diakses 10 Oktober 2019.

Ijtima Ulama III Dituding Sesatkan Umat, Begini Kata BPN Prabowo, https://www.google.com/amp/s/nasional.temo.co/amp/1201309/. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

Ijtima Ulama IV Sikapi Kecurangan Pemilu, Rusuh Mei & Kematian KPPS, https://tirto.id/. Diakses 13 Oktober 2019.

Fakta Menarik Tentang Ijtima Ulama IV, https://news.detik.com/berita/d-4654580/. Diakses 13 Oktober 2019.

Sebut Khilafah Wajib, Ijtima Ulama IV Usul NKRI Bersyariah, https://m.cnnindonesia.com-nasional/20190805191825-32-418664/. Diakses 11 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id